PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MITIGASI BENCANA DI KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Mencapai Gelar sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh

SHERLY FITRIANA
06 993 017

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2013

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan *"Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang"* adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta saksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan lain yang berlaku.

Padang, 11 Juni 2013

Yang membuat pernyataan,

SERLY FITRIANA

BP.06993017

HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : SERLY FITRIANA
No. BP : 06 993 017
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana Kota Padang

Skripsi ini telah disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Syaiful, M.Si	**Andri Rusta, S.IP, M.PP**
NIP. 196609281999031002	**NIP. 198210092006041001**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas
Padang

Drs. Syaiful, M.Si
NIP. 196609281999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan Sidang Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Politik pada tanggal 11 Juni 2013, bertempat di Ruang Sidang Jurusan Ilmu Politik, dengan tim Penguji:

TIM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Drs. Edi Indrizal, M.Si	Ketua	
Tengku Rika Valentina, S.IP, MA	Sekretaris	
Irawati, S.IP, MA	Anggota	
Dewi Anggraini, S.IP, M.Si	Anggota	
Drs. Syaiful, M.Si	Anggota	
Andri Rusta, S.IP, M.PP	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas

Prof.Dr.rer.soz. Nursyirwan Effendi
NIP. 196406241990011002

Dalam hidup terkadang kita lebih banyak
mendapatkan apa yang tidak kita inginkan.
Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan,
akhirnya kita tahu bahwa yang kita inginkan
terkadang tidak dapat membuat hidup kita menjadi lebih bahagia.

Dan setiap pelajaran akan sia-sia
Jika tidak disertai cinta
Sebab kehidupan tidak berjalan mundur,
Pun tidak tenggelam dimasa lampau
Karena tiada hidup tanpa kegagalan,
kekalahan, dan kejatuhan...

Air sungai menuju laut
Melewati jalan yang berliku
Berdirilah tegak kembali
Jangan memandang ke belakang
Masa lalu telah berlalu
Hidup berjalan terus...

Apa yang aku raih sekarang
Adalah hasil dari usaha-usaha kecil
Yang aku lakukan terus menerus
Untuk mendapatkan sebuah gelar

Apapun yang telah aku lakukan
untuk mencapai suatu keberhasilan
bukan semata-mata karena kekuatan otot
dan ketajaman pikiran...
Kesuksesan tidak selalu dibangun
di atas upaya sendiri...

Di balik semua pencapaian
terselip sebuah pengorbanan orang lain
yaitu pengorbanan orang tua
yang selalu berkorban demi sang anak
mencapai mimpi dan cita-cita...

Thanks to:

Ayahanda……
Seorang lelaki bak samudera yang senantiasa mengurungkan suapan nasi kemulutnya agar aku lebih dahulu memakannya.

Ibunda……..
Perempuan bak lautan yang senantiasa memeras madu kasihnya agar aku meneguk setetes kehidupannya.

Kepada keduanya….
Setiap mengingat pengorbanan dan semua jasa mama dan papa terhadapku, tanpa sadar slalu kuteteskan air mataku sadar akan semua kesalanku terhadap mama dan papa.
Aku haturkan do'a, semoga mendapat curahan rahmat, sebagaimana mereka mencurahkan kasihnya saat aku masih dalam dekapannya.
Melihat kedua orang tuaku tersenyum bahagia karna hasil karya ku, itu adalah hal yang luar biasa bagiku.
Ma.. terimakasih atas ketulusan mama yang telah merawat dan menjagaku hingga sampai saat ini, sesungguhnya aku takkan pernah bisa membalas semua yang pernah mama berikan untukku. Mama adalah cinta abadiku. Love You Mam ☺
Ma.. Pa.. Chely minta maaf yang sebesar-besarnya karna chely lama menyelesaikan masa Study chely di Kampus. Jangan ada lagi air mata yang menetes dari matamu, sungguh aku tak kuasa untuk melihatnya.
Terimakasih ma..paa.. merekalah penyemangat hidupku... maafkan chely Ma..pa.. yang slalu menyusahkan mama dan papa. Chely s ayang Mama n Papa ☺

Untuk semua anggota keluargaku…
Dukungan dan do'a anggota keluargaku yang mereka berikan merupakan suatu kekuatan agar aku menjadi perempuan lautan untuk kalian semua dan semoga kalian jadi pelipur lara bagiku.

Buat yang terkasih dan tersayang…

kakakku yang baik dan penyayang... Ratna Cintia Melina, S.H.
Makasih ya Tia atas semua ocehan dan omelannya, itu kamu lakukan agar aku menjadi pribadi yang baik lagi, serta berusaha sabar menghadapi tingkah laku aku selama ini, apapun itu yang kamu lakukan pasti itu yang terbaik untuk aku.

Adekku yang keren dan cute... Muhammad Zurrahman,
Thanks ya Bang karena dengan kasih sayangmu kakak akhirnya bisa juga menyelesaikan skripsi ini ,ya walau kakak nggak tepat waktu tapi ini mungkin waktu yang tepat buat kakak menyelesaikannya. Aman belajar yang rajin yah biar tercapai semua harapan dan keinginan yang telah di cita-citakan selama ini. Aku sayang saudaraku ☺

Buat oma ku tersayang....
Makasih banyak ya ma atas do'a dan semangatnya, mama tak henti-hentinya mengirimkan doa untuk chely supaya cepat menyelesaikan tugas akhir chely.

Buat p' Kamarul Zaman...
Makasi yah pak atas nasehat-nasehatnya selama ini dengan nasehat dan support yang apak berikan akhirnya chely semangat dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi masalah dengan baik.

Buat aunty2-ku...
Fatimah Rofita, S.Ag, tek chely nggak tau harus ngomong apa sama etek,mungkin ucapan terima kasih pun belum mampu untuk membayar semuanya karena begitu banyak nasehat-nasehat dan pengorbanan etek untuk chely supaya chely cepat menyelesaikan tugas chely. Fatma Dia Putri, S.Pt n Fatimah Ruri Wahyu, S.S
Makasih yah tek atas segalanya...sudah mau mendengarkan keluhan-keluhan, serta canda tawa Chely sama etek selama ini dan makasih atas nasehat-nasehat berharga buat Chely demi tercapainya suatu kesuksesan.

My sohib:

Buat Meisya Rahmawati, yang bakal jadi calon Sarjana Sastra nantinya Aaaaaaaaammmmiinnnn ☺, aku nggak tau harus bilang apa sama kamu mungkin ucapan terima kasihku belum mampu mewakili semuanya. Makasih ya sya sudah mau di ajak susah dalam pembuatan skripsi ini dari awal sampai akhir (Pengalaman juga buat kamu untuk mendapatkan sebuah titel nantinya, jadi belajar dari sekarang ya hehehe..☺) makasi telah menemani aku dalam suka dan duka, serta mau mendengarkan semua keluh kesahku, tangisanku, gelak tawaku selama ini. Kamu slalu belajar untuk mengerti aku, memahami aku, selalu menghibur aku dikala sedih dan kamu juga sangat sabar menghadapi sikap aku yang terkadang kekanak-kanakan...☺ Sya yang semangat yah kuliahnya capai gelarmu kamu pasti bisa.

ABSTRAK

SERLY FITRIANA, 06993017, Jurusan Ilmu Politik, FISIP-UNAND Padang. Dengan judul skripsi: Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana Di Kota Padang Peran Pemerintah Kota Padang. Dibimbing oleh; Drs. Syaiful, M.si dan Andri Rusta, S.IP, M.PP. Skripsi ini terdiri dari 79 halaman dengan referensi 7 Buku teori, 1 Jurnal, 3 skripsi, 6 Situs Internet.

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang persepsi masyarakat terhadap mitigasi bencana di Kota Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah keadaan Kota Padang yang masih belum pulih seratus persen akibat besarnya dampak yang timbul akibat bencana-gempa bumi September 2009 yang lalu, disamping itu masih terdapat beberapa masalah terhadap upaya pengurangan resiko bencana yang masih harus dibicirakan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data yang menyatakan bahwa masih terdapatnya dampak-dampak kerusakan baik itu berupa kerusakan bangunan, ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan studi dokumentasi. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti menggunakan trianggulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini mengacu pada konsep persepsi yang dilakukan oleh lapisan masyarakat yang ada di Kota Padang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa dari hasil pembahasan mengenai upaya pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami di Kota Padang. Penelitian ini berupaya menjelaskan dan menggambarkan peran serta Pemerintah Kota Padang dalam pengurangan resiko bencana atau mitigasi bencana Kota Padang dimana yang dibebani tugas yakni BPBD dalam mengurangi resiko bencana bukan mencegah bencana, karena bencana tidak bisa dicegah oleh siapapun. Koordinasi BPBD Kota Padang merupakan badan yang dibentuk sebagai *leading sector* penanggulangan bencana. Mengingat baru dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Padang yang belum lengkap secara struktur, sumber daya manusia, dan manajemen. secara dalam hal operasional, teknis, sarana dan prasarananya masih terbatas hal ini menjadi kendala bagi BPBD dalam melaksanakan tugasnya.

Kata kunci: *Persepsi Masyarakat terhadap mitigasi bencana di Kota Padang.*

ABSTRACT

SERLY FITRIANA, 06993017, Political Science, FISIP-UNAND Padang. With the title public perseption about mitigation disaster at padang. That guided by Drs. Syaiful, M.si and Andri Rusta, S.IP, M.PP. This paper consists of 79 pages with 7 reference book theory, 1 Journal, 3 thesis, 6 Internet Site.

In this study, the autors give describe about public perseption about mitigation disaster at padang. This research based of somethings including is padang's condition that still have yet to recover one hundred percent due to the magnitude of impacts arising from the September 2009 earthquake ago, magnitude of impacts arising from the September 2009 earthquake ago, while there are still some problems for disaster risk reduction efforts should still dibicirakan and the responsibility of the Government of Padang. Case is justified by the data indicating that there is still good impacts crash purports to damage building, economic and social life of the community.

In this study, the authors used a qualitative approach with descriptive type. Data was collected through interviews, and documentation. While the validity of the data used technique researchers used triangulation of data sources. The selection of informants was done by using purposive sampling. This study refers to the concept of perception by society in the city of Padang. From the research conducted, the researchers conclude that the results of the discussion on disaster risk reduction and tsunami earthquake in Padang. This study seeks to explain and describe the role of the Government of Padang in disaster risk reduction or mitigation of Padang where the burden of the BPBDs in disaster risk reduction not prevent disasters, because disaster can not be prevented by anyone. Padang BPBDs coordination body established as a leading sector in disaster management. Given the establishment of new Regional Disaster Management Agency (BPBD) in the city of Padang is incomplete structure, human resources, and management. is in terms of operational, technical, facilities and infrastructure are limited it is becoming an obstacle for BPBDs in performing their duties.

Keywords: *Public Perception on disaster mitigation at Padang.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala Puji hanyalah milik Allah SWT serta rasa syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini yang berjudul ***"Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang"***. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai *murabbi* agung dan teladan bagi kita semua. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha mengerahkan segenap kemampuan berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapat selama duduk di bangku perkuliahan. Sebagai manusia biasa, kesalahan dan kekhilafan mungkin saja dilakukan. Seperti kata pepatah *"tidak ada gading yang tak retak"* yang berarti bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi yang penulis buat. Mungkin masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisannya, baik itu dari segi tata bahasa maupun dari segi isinya.

Semua itu tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis menerima segala bentuk masukan baik itu berupa kritikan maupun berupa saran-saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Terlepas dari itu semua, dalam penyelesaian skripsi ini penulis dibantu oleh berbagai pihak baik itu berupa pemikiran, bimbingan, maupun petunjuk-petunjuk yang dapat penulis jadikan pegangan untuk bisa selesainya penulisan skripsi ini. Untuk itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang penulis cintai dan sayangi yaitu ayahanda (Melva) dan ibunda (Nelwati, S.Pd) yang telah membesarkan dan merawat anak-anaknya dengan cinta, kasih sayang, serta mencari nafkah dengan cucuran keringat yang tak bisa terbalas dengan apapun. Terima kasih juga buat kakak dan adikku tersayang (Ratna Cintia Melina, S.H dan Muhammad Zurrahman) yang merupakan motivator bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini secepatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik penulis yang dipersembahkan khusus untuk keluarga terutama untuk kedua orang tua penulis, semoga apa yang penulis lakukan bisa membuat ayahanda dan ibunda bangga. Selain itu, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Syaiful, M.Si selaku pembimbing I dan Andri Rusta, S,IP, M.PP selaku pembimbing II atas saran dan bimbingan beliau selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof.Dr.rer.soz. Nursyirwan Effendi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.

2. Bapak Drs. Rinaldi Ekaputra, M.Si., selaku Pembantu Dekan I, Bapak selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Asrinaldi, S.Sos, M.Si., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Drs. Syaiful, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Bapak Sadri, S.sos, M.soc, Sc., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.
5. Seluruh pegawai Biro Akademik dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang yang telah banyak membantu dalam kelancaran studi penulis.
6. Ibuk Nuraini, B.A selaku Kasi kesos dan Penanggulangan Bencana di Kecamatan Padang Barat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk penulis wawancarai.
7. Bapak Fuji Astomy, S.ST. selaku Kseksi kesiapsiagaan bencana di BPBD Kota Padang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancarai.
8. Serta masyarakat Kecamatan Padang Barat .yang telah berpartisipasi memberikan bantuan demi kelancaran penelitian penulis.
9. Kepada kakak-kakak senior yang telah memberikan motivasi pada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yaitu : Hari Duansyah Putra, S.IP., Suryanto, S.IP., Yogi Elnofanda, S.IP., Pratiwi Dwi Yustira, S.IP., Pitriamarisa, S.IP., Ruly

Saputra, S.IP., Yuda Putra, Tesa Revika Daslin, S.IP., Rafri Kamizal, Raezka Nataliona, S.IP., Prima Reda Putri, S.IP., Fegie Rullyan, S.IP., Asmajunita, S.IP., Ikhwan, S.IP., Frentina Sitorus, S.IP., Prima Yon Putra, S.IP., Dayto Plesar, S.IP., Hadran Mubarak, S.IP., Novitriandi Syas Gapita, S.IP., Mukhlis, S.IP., Rachmad Afandi, S.IP., Widia Candra, S.IP., dan Wahyuni Meliza, S.IP., junior makasi yah sudah membantu senior dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan seluruh teman-teman Angkatan 2006 Reguler yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

11. Seluruh Senior 2003, 2004, 2005 dst, serta Junior Ilmu Politik Unand 2007-08-09-10-11-12 yang tidak saya sebutkan satu persatu.
12. Buat teman-teman ku Ranggi Definta, A.Md, Wira Deswita, SE., Mutiara alfa makasi yah teman sudah membantu menyemangati dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga kebaikan tulus yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin Ya Rabbil Alamiiin...

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

BAB II KERANGKA TEORI DAN PENGUKURAN

A. Tinjauan Kepustakaan 14

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 14

2. Teori dan Kepustakaan Konseptual 18

2.1. Konsep Persepsi 20

2.2. Pembentukan Persepsi 21

2.3. Penanggulangan Bencana 22

2.4. Masyarakat 22

B. Kontruksi Model Teoritis 23

C. Skema Pemikiran 25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian....28

B. Lokasi Penelitian....29

C. Peranan Peneliti....29

D. Teknik Pemilihan Informan....31

E. Unit Analisis....34

F. Teknik Pengumpulan Data....35

G. Uji Pengumpulan Data....36

H. Analisis Data....38

BAB IV DESKRISPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Padang....39

4.1.1 Keadaan Geografis....41

4.1.2 Topografi Daerah....41

4.1.3 Iklim....43

4.1.4. Keadaan Demografis....44

4.2. Gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang....47

4.3. Gambaran Umum Kecamatan Padang Barat....49

BAB V TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Mitigasi Bencana di Kota Padang....50

5.2 Persepsi masyarakat terhadap Upaya Dalam pengurangan resiko bencana Kota Padang....54

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....72

6.2 Saran-saran.....74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak wilayah yang rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Bencana dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, geologis, iklim maupun faktor-faktor lain seperti keragaman sosial, budaya dan politik. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa dan rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran dan abrasi pantai.[1]

Perubahan paradigma tentang bencana memberikan pandangan baru terhadap penanggulangan bencana di Indonesia, dari yang sifatnya responsif menjadi menejemen risiko. Bencana sesuatu yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di muka bumi. Dalam perkembangannya ilmu tentang bencana banyak dikaji. Dalam konsep ilmu bencana penting bagi kita untuk membedakan antara bencana dan ancaman, sehingga pemahaman ini akan menjadi tolak ukur dalam mengenal apa itu risiko bencana.

---

[1]. http://landspatial.bappenas.go.id/peraturan/the_file/uuno.24tahun2007.pdf. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam. Di akses pada tanggal 22 Desember 2010 pukul 19.00 wib.

Bencana *(Disaster)* adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan meluas yang melampaui batas komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri *(ISDR, 2004)*.

Pada hakekatnya semua jenis bencana baik yang disebabkan oleh alam, ulah manusia, dan atau keduanya seperti; gempa bumi, tsunami, letusan gunung merapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/bencana asap, abrasi pantai dan wabah hama penyakit. Selain itu bencana akibat kecelakaan industri serta kegagalan teknologi juga mengancam kehidupan bangsa Indonesia khususnya bagi masyarakat indonesia itu sendiri. Bencana mengakibatkan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana, serta fasilitas umum. Selama ini penanganan bencana telah diupayakan untuk ditangani oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.[2] Koordinasi yang telah dilaksanakan sejak dari lokasi bencana di daerah sampai pada tingkat nasional telah berjalan cukup baik. Namun mengingat banyaknya kejadian bencana, mengharuskan untuk lebih dimantapkan kualitas dan manajemen bencana.

[2]. Seperti bencana gempa bumi, Pemerintah mengajak masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana yang telah terjadi belakangan ini.

Negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB).[3]

Dalam setiap kejadian bencana di Indonesia ada berbagai pihak yang bekerjasama berusah menanggulangi bencana, yaitu: pemerintah, LSM lokal dan internasional serta masyarakat itu sendiri. Hubungan antara pihak-pihak terkait ini sebaiknya dijalin pada tahap sebelum bencana, di bawah koordinasi lembaga pemerintah yang mempunyai tugas utama dalam penanggulangan bencana, sesuai dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 pada tingkatan daerah masing-masing. Undang-Undang Penanggulangan Bencana (selanjutnya akan disebut UU PB) secara umum merupakan sebuah kemajuan bagus untuk sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Sistem lama yang lebih bergantung pada status darurat diubah menjadi pencegahan (preventif), dengan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah dalam menentukan rencana penanggulangan bencana yang digunakan sesuai dengan kearifan lokal setempat. Undang-undang ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada kehidupan dan penghidupan yang ada di Negara Republik Indonesia dari bencana dengan cara menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.

[3] . Politik Bumi dan Manajemen Bencana dalam "Jurnal Dialog Kebijakan Publik" Edisi 1/Juni/Tahun II/2008.

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6). Pencegahan merupakan suatu upaya preventif dalam mengelola ancaman dan kerentanan dari risiko bencana yang tertuang dalam program-program masyarakat di tingkat lokal maupun daerah di tingkat Kabupaten untuk menghilangkan secara total ancaman dan kerentanan penyebab risiko bencana.

Begitupun halnya dengan Kota Padang, Wilayah pantai barat Sumatera merupakan wilayah yang memiliki kerentanan gempa bumi yang tinggi karena berada 250 km sebelah timur dari zona subduksi Sumatera. Sejarah kegempaan di zona subduksi ini telah mencatat peristiwa gempa bumi besar (magnitudo > 6,0 SR) selama kurun waktu dua abad terakhir. Di wilayah Provinsi Sumatera Barat tercatat bahwa Kota Padang semenjak tahun 1835 telah diguncang gempa dengan skala 5-8 MMI[4].

Sebagai daerah yang rawan bencana[5] diperlukan tindakan-tindakan antisipasi bencana. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah

[4]. Bencana (Online) dimuat dalam (Http://www.jtic.org/jtic/images/en/diPDF/Lipi_CBDP/reports/bab_4-3.pdf). Diakses pada tanggal 30 Desember 2009.

[5]. Seperti yang dijelaskan para ahli seluruh dunia bahwa ratusan ribu jiwa penduduk berada dalam ancaman gempa bumi raksasa dan tsunami pada masa yang akan datang Di Provinsi Sumetra Barat dan Provinsi Bengkulu. Bukti-bukti ilmiah secara meyakinkan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut di masa yang akan datang sungguh akan terjadi dalam masa dekat ini, yang tentunya tidak dapat diketahui secara pasti. Mengingat gempa bumi besar yang telah terjadi dengan siklus pengulangan setiap kisaran peride dua abad dan peristiwa yang terakhir terjadi pada 172 tahun dan 208 tahun lalu,

melalui Mitigasi Bencana *(Mitigate Disaster)*. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (9)). Ada dua bentuk mitigasi yaitu; mitigasi struktural yaitu pembuatan chekdam, bendungan, tanggul sungai dll, mitigasi nonstruktural yaitu membuat peraturan, tata ruang, dan pelatihan. Kegiatan mitigasi difokuskan pada pengenalan daerah rawan ancaman bencana dan pola perilaku individu/masyarakat yang rentan terhadap bencan. Mitigasi bertujuan untuk meminimalisasi dampak ancaman bencana dilakukan melalui pembuatan struktur bangunan dan telah melakukan identifikasi ancaman dengan program-program yang diprioritaskan untuk mengelola ancaman.

Kegiatan penanggulangan bencana adalah seluruh aspek kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum terjadi, saat terjadi, dan sesudah terjadi bencana yang dirancanag untuk memberikan kerangka bagi orang perorangan atau komunitas yang berisiko terkena bencana untuk menghindari risiko, mengendalikan risiko, mengurangi risiko, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,

yaitu gempa besar yang pernah melanda Kepulauan Mentawai, sisi pantai barat Sumbar dan Bengkulu pada tahun 1797 dan 1833. (Kogami, 2009, p.4).

tanggap darurat, rehabilitas dan rekontruksi.[6] Peranan pemerintah pada akhirnya dalam penanganan bencana sangatlah penting. Sebab salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap warga negaranya.

Banyak hal yang harus dilakukan oleh Pemko Padang dan segenap unsur masyarakat dalam upaya meminimalisir jatuhnya korban jika bencana gempa dan tsunami itu terjadi.

Hal seperti inilah yang banyak terlihat ketika gempa bumi melanda Sumatera Barat, khususnya kota Padang pada tanggal 30 September 2009 yang lalu. Gempa bumi yang tergolong besar ini memakan banyak korban jiwa, materi dan ratusan ribu orang yang mengungsi ke tempat yang aman. Data final jumlah korban meninggal di Sumater Barat adalah sebanyak 1.195 orang. Data korban lainnya adalah luka berat 619 orang dan luka ringan 1.179 orang. Sementara data kerugian materi tercatat 114.797 rumah penduduk rusak berat, 676.198 rusak sedang, dan 67.828 rusak ringan. Kerusakan sarana fasilitas umum, tercatat jumlah kerusakan sebanyak 2.163 ruang pendidikan, 51 unit fasilitas kesehatan, 1.001 rumah ibadah, 21 unit jembatan, 178 unit ruas jalan, 130 irigasi rusak berat. Sedangkan di Kota Padang sendiri jumlah korban jiwa gempa bumi 2009 yang lalu, dilihat dari tabel di bawah ini.

---

[6]. http://Petrasawacana.wordpress.com/2011/06/26/Kajian Teoritis Tentang Penanggulangan Bencana. Diakses pada tanggal 21 Maret 2012 pukul 12.00 wib.

Tabel: 1.1

Dibawah ini menjelaskan jumlah korban jiwa gempa bumi tanggal 30 September 2009 yang terjadi di kota Padang.

No	Kecamatan	Korban Jiwa				
		Hilang	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Mengungsi
1	Lubuk Kilangan	0	3	1	1	0
2	Koto Tangah	1	20	3	130	0
3	Kuranji	0	6	9	7	0
4	**Padang Barat**	**0**	**128**	**190**	**228**	**0**
5	Padang Utara	0	13	10	0	0
6	*Padang Selatan*	*0*	*20*	*15*	*12*	*0*
7	**Padang Timur**	**0**	**68**	**139**	**182**	**0**
8	Nanggalo	0	17	10	128	0
9	Lubuk Begalung	3	31	24	29	0
10	Pauh	0	4	1	1	0
11	Bungus Teluk Kabung	0	6	0	7	0
	Jumlah	4	383	431	771	0

Sumber: *Press Realese* Pemko Padang, www.padang.go.id

Dapat dijelaskan dari tabel diatas bahwa pada tanggal 30 September 2009 telah terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat mengguncang Kota Padang sehingga menelan banyak korban jiwa. Ada beberapa daerah yang banyak mengalami korban Luka ringan, meninggal, dan luka berat seperti di

Daerah Padang Barat dan Daerah Padang timur. Yang mana di daerah Padang Barat mengalami luka ringan sebanyak 228 orang, meninggal 128 orang dan yang mengalami luka berat sebanyak 190 orang. Sedangkan di Daerah Padang Timur mengalami luka ringan sebanyak 182 orang, meninggal 68 orang dan yang mengalami luka berat 139 orang.

Untuk mengurangi korban jiwa serta kerugian akibat terjadinya bencana khususnya gempa bumi, untuk itu pemerintah Kota Padang membuat upaya-upaya agar dapat mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda. Sampai saat ini belum ada satupun alat yang mampu memprediksi secara akurat kapan dan dimana akan terjadi gempa bumi dan tsunami. Upaya penanganan bencana yang mesti dilakukan oleh Pemko Padang terdiri dari kegiatan Pra bencana, kebijakan saat terjadinya bencana, dan tahapan pasca bencana. Pada kegiatan pra bencana berupa peningkatan kesiapsiagaan, berbagai kegiatan pra bencana dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan kota Padang dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami juga harus giat dilakukan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kegiatan pra bencana atau sebelum bencana terjadi harus lebih diutamakan dari kegiatan pasca bencana. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko dari dampak bencana tersebut. Kegiatan-kegiatan pra bencana khususnya peningkatan kesiapsiagaan yang telah dilakukan Kota Padang diantaranya adalah memperkuat organisasi penanganan bencana, edukasi dan pelatihan

penyelamatan diri, simulasi, evakuasi, memperlengkap dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk penyelamatan.

Selain upaya yang bersifat preventif, perlu juga ada upaya-upaya pemerintah yang sifatnya represif. Tentunya upaya-upaya tersebut harus dikoordinasikan secara baik dengan masyarakat. Beberapa contoh upaya-upaya tersebut adalah:

1. Melaksanakan tindakan darurat dengan mengutamakan keselamatan manusia dan harta bendanya.
2. Segera membentuk posko-posko penanggulangan bencana, regu penyelamat, dapur umum, dan lain-lain.
3. Melakukan pendataan terhadap faktor penyebab timbulnya bencana alam maupun besarnya kemungkinan korban yang diderita untuk bahan tindakan selanjutnya serta berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.
4. Sesuai dengan situasi dan perkembangan bencana alam serta kemajuan yang dicapai dari upaya-upaya penanggulangan darurat, segera menetapkan program rehabilitasi baik bidang fisik, sosial, dan ekonomi.
5. Perlunya melaksanakan sebuah program pemantapan terhadap semua faktor kehidupan yang realisasinya dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan demi terwujudnya konsolidasi dan normalisasi secara penuh.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah, namun bukan berarti masyarakat lain tidak ikut dilibatkan dalam penanganan bencana. Pentingnya penanganan bencana karena terkait dengan keselamatan jiwa manusia sebagai warga negara. Padahal kewajiban negara adalah memberikan proteksi terhadap nyawa maupun harta warga negaranya.[7]

Pada kasus Gempa Bumi yang terjadi di Kota Padang tujuan Mitigasi tidak hanya menyelamatkan jiwa dan mengurangi kerugian-kerugian harta benda, akan tetapi juga mengurangi konsekuensi merugikan dari bahaya-bahaya alam terhadap aktivitas-aktivitas dan institusi-institusi sosial. Penilaian kerentanan merupakan aspek penting dari perencanaan mitigasi yang efektif.[8]

Tujuan dari pemulihan/rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali sedangkan Tahap rekonstruksi merupakan tahap lanjutan dari tahapan rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki kembali dan membangun pelayanan publik pada tahap yang memadai dan membangun masyarakat serta wilayahnya dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat, sehingga minimal dapat

---

7. http://jurnal-politik.co.cc/upaya-upaya-penanggulangan-bencana-alam-yang-berbasis-sinergisitas-antara-pemerintah-dengan-masyarakat/. Di akses pada tanggal 21 Maret 2012. Pukul 12.00 Wib.

8. Pengantar manajemen bencana.htm. dimuat dalam *My Medical journal* . Diakses pada tanggal 20 september 2010.

berfungsi seperti semula dan bahkan menjadi lebih baik lagi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Rencana pemulihan harus berkualitas, disusun secara lengkap dan disempurnakan dari tahun ketahun. Makin pendek masa pemulihan, makin kecil kerugian akibat bencana. Sebaliknya, makin panjang masa pemulihan, makin lama mulainya kembali masa produktif.[9]

Bagaimana pandangan masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Apakah upaya pemerintah daerah akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, dalam arti mampu meningkatkan kesejahteraan, baik yang dapat diukur melalui indikator-indikator ekonomi maupun sosial, jelas andil birokrasi tidak bisa diabaikan. Tentunya juga tidak kurang pentingnya andil masyarakat dalam mengurangi resiko bencana. Upaya pemerintah daerah lebih bersifat reaktif dan tidak berdasarkan pada pengetahuan dalam penanggulangan bencana. Untuk tanggap darurat, misalnya, kepala daerah tidak pernah dilatih soal prosedur distribusi bantuan, prosedur evakuasi korban, penanganan pengungsi, penanganan kesehatan korban, koordinasi antar instansi, dan lainnya. Untuk itu dengan penjelasan diatas, maka peneliti ingin menjelaskan seperti apa persepsi masyarakat terhadap mitigasi bencana khususnya bencana di Kota Padang.

---

[9]. Disaster recovery planning dimuat pada (www.KSAP.org). *Manajemen Bencana Administrasi Dan Akuntansi*) Diakses pada tanggal 30 desember 2009.

B. Rumusan Masalah

Setiap bencana tentunya menimbulkan perubahan dan kerugian pada daerah tersebut, namun hal yang paling penting ketika suatu bencana terjadi adalah bagaimana daerah tersebut secepat mungkin bangkit dan melakukan pemulihan dan pembenahan terhadap dampak bencana tersebut. Satu-satunya instansi yang diharapkan mampu bekerja cepat dan tanggap terhadap situasi bencana ini adalah Pemerintah Daerah. Beberapa latar belakang tersebut, rumusan masalah yang hendak dijawab dari penelitian ini yaitu "Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Mitigasi Bencana Di Kota Padang???"

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang.
2. Mengetahui upaya pemerintah terhadap mitigasi bencana di Kota Padang.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dan diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan tentang persepsi masyarakat mengenai upaya Pemerintah Kota Padang dalam penanggulangan bencana alam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Padang yang berkaitan dengan penaggulangan bencana.
3. Secara sosial, penelitian diharapkan dapat membentuk kesadaran terhadap masyarakat Kota Padang pada umumnya agar bisa menjaga kelestarian alam.
4. Secara teknis, penelitian ini dapat menghasilkan teknik pengukuran yang lebih valid dan reliabel dalam menangani masalah Pemerintah Kota Padang dalam penanggulangan bencana alam khususnya bagi masyarakat yang terkena musibah bencana alam.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN PENGUKURAN

A. Tinjauan Kepustakaan

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang relevan

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti adalah :

Peneliti yang pernah meneliti tentang *Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Penanggulangan Dampak Pasca Bencana Gempa Bumi 30 September 2009* di Kota Padang yaitu Soraya Oktarina (2010). Penelitian ini bermaksud untuk meneliti peran yang dilakukan pemerintah kota Padang dalam upaya penanganan dampak bencana pasca gempa 30 september 2009 di kota padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik analisis data deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan pemerintahan kota padang telah berusaha menjalankan peran sebaik mungkin menangani dampak bencana gempa 30 september 2009, akan tetapi karena masih baru sehingga masih banyak kekurangan dan pada hasilnya belum maksimal.

Penelitian Muktaf Haifani Akhmad[10] dalam penelitiannya dengan memilih judul tentang *Manajemen Resiko Bencana Gempa Bumi (Studi Kasus Gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006)*. Penelitian ini bertujuan Merumuskan ide konstrukstif sistem mitigasi terhadap bencana gempa bumi yang baik dan dapat diterapkan pada suatu kasus bencana tertentu pada wilayah tertentu dan melibatkan berbagai pihak secara terorganisir. Dalam menganalisis data, teknik yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Penanganan korban bencana gempa bumi Yogyakarta 26 Mei belum dilakukan secara terintegrasi dan belum melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan sehingga sistem mitigasi terhadap bencana gempa bumi belum bisa terlaksana.

Sedangkan Zikri Alhadi[11] dalam penelitiannya dengan memilih judul tentang *Upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami (Suatu Studi Manajemen Bencana)*. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami.

---

[10]. Muktaf haifani akhmad. Manajemen Resiko Bencana Gempa Bumi (Studi Kasus Gempabumi Yogyakarta 27 Mei 2006). Seminar Nasional IV Teknologi Nuklir Yogyakarta, 25-26 Agustus 2008.

11. Zikri Alhadi. Upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami (Suatu Studi Manajemen Bencana).

Metode penelitian ini adalah pendekatan positivisme dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, peneliti mempergunakan metode deskriptif yang dipergunakan untuk menyusun dan menganalisis data sehingga dapat di peroleh gambaran mengenai masalah yang dihadapi pada saat penelitian. Sedangkan yang akan menjadi judul penelitian peneliti yaitu mengenai "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang". Peneliti bermaksud meneliti tentang persepsi Masyarakat terhadap mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah kota padang dalam upaya penanganan bencana di kota Padang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisi data deskriptif.

Tabel: 2.1

Tabel Pembanding Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan

Peneliti/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil Penelitian
Muktaf Haifani Akhmad (2006)	Manajemen risiko bencana gempa bumi (Studi kasus Gempa bumi Yogyakarta 2006).	Untuk merumuskan ide konstruktif sistem mitigasi terhadap bencana gempa bumi yang baik dan dapat diterapkan pada suatu kasus bencana tertentu pada wilayah tertentu dan	Penanganan korban bencana gempabumi Yogyakarta 26 Mei belum dilakukan *secara terintegrasi* dan belum melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan sehingga sistem mitigasi terhadap bencana gempabumi belum bisa terlaksana

		melibatkan berbagai pihak secara terorganisir.	
Zikri Alhadi (2009)	Upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami (Suatu studi Manajemen Bencana).	Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami.	Pemerintah Kota Padang secara garis besar sudah mulai memperhatikan faktor kesiapsiagaan sebagai unsur penting dalam penanggulangan bencana dengan telah diinisiasikanberbagai program kesiapsiagaan
Soraya Oktarina (2010)	Peran pemerintah Kota Padang dalam upaya penanganan dampak bencana pasca gempa 30 September 2009 di Kota Padang	Tujuannya yaitu menunjukkkan pemerintah kota padang telah berusaha menjalankan peran sebaik mungkn menangani dampak bencana gempa 30 september 2009 di Kota Padang.	-
Sherly Fitriana (2010)	Persepsi Masyarakat Terhadap mitigasi	Mengetahui persepsi masyarakat terhadap	

	bencana Di Kota Padang	mitigasi bencana di Kota Padang.	

2. Teori dan Kepustakaan Konseptual

2.1. Konsep Persepsi

Menurut Ruch (1967:300) Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi (Sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan hal tersebut Atkinson dan Hilgard (1990:201) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Gibson dan Donely (1994:53) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.

Pada hakikatnya merupakan proses kognitif yang dialami setiap orang

dalam mengamati lingkungan tertentu. Persepsi bukan merupakan penafsiran seseorang yang diinterprestasikan dalam sikapnya ketika mengamati situasi langsung. Persepsi timbul karena adanya dua faktor yaitu internal, dimana tergantung pada proses pemahaman sesuatu didalamnya sistem nilai tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang

dicapai. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal berupa lingkungan[12]. Secara teoritis sering dikemukakan oleh para akademis bahwa persepsi perorangan mengenai suatu objek memiliki dampak yang sangat kuat terhadap perilaku individu yang bersangkutan dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan[13].

Persepsi dalam psikologi diartikan sebagai salah satu perangkat psikologi yang menandai kemampuan seseorang untuk mengenal dan memaknai sesuatu objek yang ada dilingkungannya.[14]

Tokoh terkemuka tentang persepsi yaitu Robert Jervis (1970) menguraikan bahwa pengambil keputusan akan mudah terjebak dalam mispersepsi atau persepsi yang salah. Artinya persepsi merupakan proses kognitif yang komplek dengan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataannya.

---

[12]. Miftha Thoha. Perilaku organisasi: *Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. Hlm. 121.

[13]. Syarif Hidayat. *"Too much too soon"* Edisi dua bahasa. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. *Hlm. 221.*

[14]. http//www.depsos.go.id/Balitbang.htm diakses 1 november 2007. Proses pemaknaan yang bersifat psikologis sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan dan lingkunagan sosial secara umum. Persepsi dalam penelitian ini bagaimana pendapat masyarakat terhadap situasi dan bukannya pencatatan yang benar terhadap situasi karena persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan faktor personal. Dalam hal ini masyarakat yang menjadi objek yang mana persepsinya dibutuhkan agar partisipasinya dalam masyarakat menentukan pilihannya bisa mencapai tujuannya. Jika persepsi salah maka kebijakan yang ada juga akan salah. Artinya masyarakat dalam memberikan pendapat harus sesuai dengan keadaan begitu juga dengan pengambil kebijakan harus melihat apakah kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.

Terjadinya perbedaan persepsi diantara seseorang atau sekelompok orang karena adanya perbedaan fokus perhatian dalam menghadapi objek, latar belakang, kebutuhan yang sudah ada dalam kehidupannya dan ciri-ciri pribadi dari individu tersebut. Dalam proses terbentuknya persepsi sangat dipengaruhi oleh tiga variabel yakni:

1) Objek atau peristiwa yang dipahami
2) Lingkungan terjadinya persepsi
3) Orang-orang yang melakukan persepsi[15]

Jadi persepsi tidak hanya ditentukan oleh stimulus secara objektif, tetapi juga ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan orang yang mempersepsi. Adanya aktivitas dalam diri seseorang yang berperan sehingga bisa menghasilkan sebuah persepsi. Persepsi yang bervariasi dari orang ke orang dan dari waktu ke waktu yang diperoleh akan mempengaruhi arah fokus kita dalam memandang suatu masalah, karena persepsi sangat tergantung pada proses pengambilan keputusan, maka keputusan yang dambil oleh masyarakat harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Dalam penelitian ini persepsi yang dimaksud adalah bagaimana pengetahuan seseorang terhadap suatu objek yang dilihatnya, artinya pengetahuan yang mendalam dimana seseorang tahu dan paham terhadap

[15]. *Ibid.* hlm. 122.

obyek yang dilihatnya. Seperti yang diketahui bahwa salah satu yang mempengaruhi terbentuknya persepsi yang telah dipahami.

2.2. Pembentukan Persepsi

Persepsi juga merupakan proses yang melibatkan aspek kognitif dan afektif individu untuk melakukan pemilihan, pengaturan, dan pemahaman serta penginterpretasian rangsangan-rangsangan indrawi menjadi suatu gambar obyek tertentu secara utuh.[16]

Aspek kognisi adalah aspek yang berkenaan dengan ide, konsep, pemikiran dan intelektual. Dalam aspek kognisi, manusia akan memproses segala informasi yang diterimanya dari penginderaan melalui kesadaran sebelum dijadikan respon atau reaksi, sehingga kemudian akan timbul ide-ide atau pikiran-pikiran dan konsep-konsep tentang objek yang diamati. Ini berarti berwujud pengolahan, pengamatan dan keyakinan serta harapan-harapan tentang objek. Sedangkan aspek afeksi berwujud proses yang menyangkut kehidupan emosional, perasaan dan nilai-nilai. Namun aspek afeksi ini tidak saja menyangkut perasaan setuju atau tidak setuju, akan tetapi juga menyangkut mencari alasan mengapa seseorang menganggap sesuatu itu baik, buruk, senang, tidak senang dan sebagainya.

---

[16]. Eka Danta Jaya Ginting, 2003, Hubungan Persepsi terhadap Program Pengembangan Karir dengan Kompetensi Kerja, (online), (http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=501), diakses 20 November 2010 pukul 19.00 Wib.

Sedangkan persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah proses yang melibatkan aspek kognitif dan afektif individu untuk memahami informasi tentang lingkungannya serta penginterpretasian rangsangan-rangsangan indrawi menjadi suatu pandangan secara utuh yaitu persepsi masyarakat terhadap mitigasi bencana di Kota Padang.

2.3. Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan/atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.[17] Bencana mengakibatkan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana, serta fasilitas umum.

2.4. Masyarakat

Masyarakat menurut Ralph Linton merupakan suatu kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama-sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan social dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

[17]. Pedoman Penanganan Pasca bencana diakses pada (*www.bakornaspb.go.id)* diakses pada tanggal 5 Januari 2010 pukul 20:00 WIB

Sementara Moenir mendefenisikan bahwa masyarakat sebagai kelompok orang yang terikat oleh bersamaan cita-cita dan tujuan.[18] Masyarakat menurut Moenir pada dasarnya terbagi atas 2 golongan :

- Masyarakat keluarga adalah masyarakat yang terbentuk berdasarkan ikatan keturunan atau berdasarkan perkawinan dan turun-temurun.
- Masyarakat kepentingan dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat.

Gabungan antara masyarakat keluarga dengan masyarakat kepentingan inilah yang membentuk berbagai individu yang berbeda yang mempunyai satu ikatan atau tujuan bersama dan mengatur kehidupan mereka sendiri. Masyarakat yang dimaksudkan disini adalah masyarakat yang berada dibawah ruang lingkup Kota Padang yang terdiri dari pengalaman mereka dalam menghadapi bencana alam.

B. Kontruksi Model Teoritis

Persepsi tersebut dapat dilihat dari aspek kognitif dan afektif, yaitu pengetahuan dan penilaian masyarakat terhadap informasi yang didapatnya mengenai pemerintah daerah dalam menghadapi mitigasi bencana tersebut. Salah satu bentuk informasi yang bisa mendasari persepsi masyarakat adalah kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkannya. Jika persepsi masyarakat

[18]. Moenir, H.A.S, 1955, "*Managemen Pelayanan Umum di Indonesia*", Jakarta : Bumi Aksara.

tersebut positif terhadap pemerintah yang mampu menanggulangi bencana maka masyarakat cenderung untuk mempertahankan pemerintah daerah yang telah ada itu. Dengan kata lain persepsi masyarakat dapat menjadi salah satu pertimbangan kelayakan seorang pemerintah dalam menanggulangi bencana.

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep untuk menjelaskan permasalahan penelitian yang nantinya akan menjadi variabel-variabel yang akan diukur, diantaranya adalah:

1) Persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah proses yang melibatkan aspek kognitif dan afektif individu untuk memahami informasi tentang lingkungannya serta penginterprestasian rangsang-rangsang indrawi menjadi suatu pandangan secara utuh. Dari konsep persepsi itu kemudian diturunkan menjadi variabel yaitu persepsi terhadap Pemerintah Daerah. Persepsi merupakan bagaimana seseorang individu melihat dan memahami orang lain. Dalam hal ini persepsi melibatkan orang yang melihat dan orang yang dilihat atau dinilai.
2) Masyarakat adalah manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan dengan batas-batas yang dirumuskan dengan gelar. Pengertian lain dari masyarakat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh kesamaan cita- cita, tujuan dan kerja sama dalam mencapai tujuan.

3) Dari konsep-konsep diatas, maka yang menjadi persepsi dalam penelitian ini adalah Pandangan Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana Kota Padang.

C. Skema Pemikiran

Pada gambar dibawah ini memperlihatkan alur dari skema pemikiran penelitian sebagai berikut:

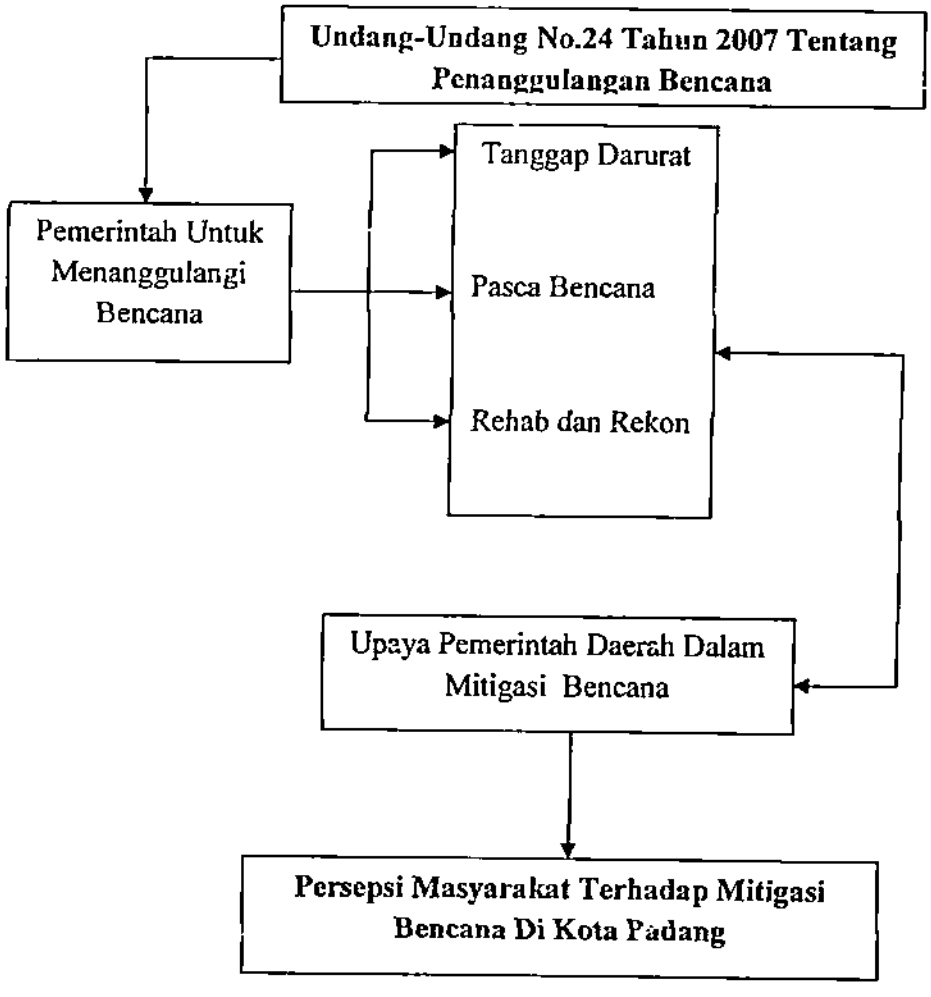

Dari skema pemikiran diatas maka dapat dijelaskan bahwa dengan adanya Undang-udang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang mana Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan/atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan pada lingkungan, kerusakan pada sarana, prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Akibat banyak bencana kita harus melakukan penanggulangan bencana agar masyarakat tidak mengalami kerugian secara mental dan harta. Adapun upaya pemerintah dalam penanggulangan dampak bencana alam yaitu pemerintah dan masyarakat dapat melakukan perencanaan dan pengorganisasian agar adanya arahan dan kebijakan dalam perencanaan penanganan situasi darurat yang tepat dan selalu diperbarui dan adanya

sumber daya secara lengkap dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Pemerintah juga melakukan upaya tanggap darurat agar masyarakat yang terkena musibah langsung mendapatkan kebutuhan dasarnya. Pemerintah dapat mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan yang mendesak agar dapat menindaklanjuti tahap tanggap darurat dan secepatnya melakukan rekonstruksi untuk membangun kembali kawasan dengan melibatkan masyarakat. Persepsi juga merupakan proses yang melibatkan aspek kognitif dan afektif individu untuk melakukan pemilihan, pengaturan, dan pemahaman serta penginterpretasian rangsangan-rangsangan indrawi menjadi suatu gambar obyek tertentu secara utuh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan *Metode Kualitatif.* Bogdan dan Taylor mendefenisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara utuh.[19]

Penelitian survey telah digunakan untuk tujuan deskriptif, eksplanatif, dan eksploratif. Survey-survey itu khususnya digunakan dalam penyelidikan yang menjadikan orang-orang individual sebagai unit analisis, sekalipun metode ini dapat digunakan untuk unit-unit analisis lain seperti kelompok, atau interaksi setiap orang secara individual juga dapat dijadikan sebagai responden atau informan. Penelitian survey mungkin merupakan metode terbaik yang tersedia bagi ilmuan sosial yang sangat tertarik pada usaha mengumpulkan data asli dalam rangka mendeskripsikan populasi yang terlalu besar bila diamati secara langsung.[20]

---

[19]. Lexy J. Maleong, 1999, "*Metodologi Penelitian Kualitati"f,* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 3.

[20]. Earl Babbie. *Menerapkan Metode Penelitian Survey Untuk Ilmu Sosial*,Palmall, Jogjakarta, Hlm. 59.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atas apa yang diteliti yang juga merupakan jalan praktis untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Pondok Kecamatan Padang Barat. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi di Kelurahan Pondok Kecamatan Padang Barat karena daerah itu merupakan daerah yang mengalami kerusakan yang paling parah dan banyak menelan korban jiwa serta kerugian materi yang di tanggung oleh pemerintah Kota Padang.

C. Peranan Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Peneliti berperan murni sebagai peneliti, yang artinya berada di luar objek penelitian dan fokus pada objek dengan tetap memperhatikan aspek- aspek penting dalam proses mengumpulkan data.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data, peneliti melakukan serangkaian tindakan sesuai dengan objek yang diteliti. Diawali dengan memasukkan surat dari Program Studi Ilmu Politik ke Bagian Kemahasiswaan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas untuk mendapatkan surat izin penelitian, pada tanggal 25 Februari 2013. Namun, surat izin penelitian ini tidak langsung diperoleh sehingga peneliti harus rela menunggu hingga 1 minggu lamanya, pada tanggal 04 Maret 2013, peneliti mendapatkan surat izin turun lapangan yang dikeluarkan oleh Pembantu Dekan I FISIP atas nama Dekan dengan Nomor: 341/UN16.08.WD/PP-2013. Berdasarkan surat peneiitian tersebut, peneliti turun kelapangan pada tanggal 05 Maret 2013 dengan cara memasukkan surat izin penelitian tersebut ke Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang. Pada hari itu juga dan hanya menunggu beberapa jam peneliti langsung mendapatkan Surat Keterangan/Rekomendasi untuk melakukan penelitian dengan Nomor: 070.03.480/Kesbang.pol/2013 yang didalam surat itu juga ditujukan tembusan kepada dinas atau badan pemerintah yang akan diteliti, yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Damkar Kota Padang, Camat Padang Barat.

Pada tanggal 7 Maret 2013, peneliti datang ke kantor Camat untuk melakukan wawancara sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Di kantor Camat Padang Barat peneliti diantarkan oleh ibuk Khadijah selaku sekretaris di kantor camat tersebut ke kasi Kesos dan Penanggulangan Bencana dimana bagian inilah yang ditugaskan untuk memberikan informasi sesuai yang peneliti inginkan, disana peneliti bertemu dengan ibuk Nuraini,

B.A. yang menjabat sebagai Kasi kesos dan penanggulagan bencana. Setelah selesai mewawancarai buk Nuraini yang dipanggil dengan ibuk Nung, di hari yang sama peneliti bergegas menuju ke kantor BPBD kota padang yang beralamat di Jalan By Pass KM 7 Kelurahan Pasar Ambacang. Setelah itu peneliti disarankan untuk memasukkan surat penelitian di Damkar jalan Rasuna Said No. 56 untuk memperoleh surat izin melakukan penelitian yang bertempat di BPBD By Pass. Pada tanggal 13 Maret peneliti baru memperoleh surat izin penelitian/tanda masuk ke BPBD jalan by Pass 7 Km Kelurahan Pasar Ambacang peneliti langsunbg menuju ruangan bagian kesiapsiagaan, peneliti bertemu dengan bapak Fuji Astomy, S.ST selaku seksi kesiapsiagaan disana peneliti langsung mewawancarai bapak Tomy.

Secara keseluruhan penelitian ini memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Dalam melakukan penelitian ini tidaklah mudah dan membutuhkan pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang maksimal.

D. Teknik Pemilihan Informan

Informan merupakan orang atau individu yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dengan tujuannya adalah menjaring informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber serta menggali informasi

yang akan menjadi dasar rancangan dari teori yang akan dibangun.[21] Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif dinamakan nara sumber, partisipan atau informan, karena mereka tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan secara pasif tetapi secara aktif berinteraksi secara interaktif dengan peneliti seperti yang peneliti ciptakan.

Penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini tidak dibatasi dengan banyaknya atau jumlah responden. Dalam penelitian ini masalah yang dihadapi dalam penarikan sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan (judgment) peneliti, berkaitan dengan perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi, sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian. Dengan demikian logika ukuran sampel (banyak sedikitnya ukuran sampel) dibatasi/dihubungkan dengan tujuan penelitian, masalah penelitian, teknik pengumpulan data, dan keberadaan kasus yang kaya akan informasi (atau oleh kecukupan informasi yang diperoleh).

[21] Lexy J. Maleong, *Ibid*, hlm. 3.

Informan yang ditetapkan adalah informan yang sesuai dengan kategori peneliti (unit analisis) oleh karena itu tipe yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* (memilih dengan sengaja) untuk menentukan informan. Dengan kata lain peneliti menentukan informan secara subjektif dengan asumsi informan sesuai dengan kriteria masyarakat. Teknik *Purposive Sampling* digunakan agar diperoleh data yang tepat dari informan yang tepat dengan menyesuaikan tujuan penelitian atau tujuan tertentu.

Adapun di dalam menentukan kareteria informan, maka ada lima kriteria untuk pemilihan informan dalam penelitian.[22]

1. Subjek yang cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan dan medan aktifitas yang menjadi informan, juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatan dan cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan. Ini biasanya ditandai dengan kemampuan dalam memberi informasi tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek yang terlibat secara penuh aktif dalam lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti. Mereka yang sudah tidak aktif biasanya

---

22 Burhan, Bungin. 2003. *Analisa Data Penelitiaan Kualitatif.* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: hal 54-55

informasi terbatas dan kurang akurat, kecuali ingin menggali informasi tentang pengalaman mereka.

3. Subjek yang mempunyai banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.
4. Subjek yang dalam informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu atau tergolong apa adanya dalam memberikan informasi.
5. Subjek yang tergolong masih asing dengan penelitian, sehingga peneliti merasa lebih tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek sebagai guru baru dalam penelitian.

Dari lima kriteria yang telah di jelaskan tersebut maka peneliti menetapkan beberapa masyarakat yang ada di Kelurahan Pondok Kecamata Padang Barat sebagai informan yang akan diwawancara oleh peneliti.

E. Unit Analisis

Unit analisis yaitu lembaga yang berperan dalam menanggulangi dan melakukan koordinasi dalam penanggulangan bencana alam, dimana sesuai dengan UU no 24 tahun 2007.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui dokumentasi. Untuk dapat menjawab setiap persoalan dalam penelitian ini, maka data akan dikumpulkan melalui tiga metode, yaitu:

1. Wawancara

   Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui informasi lisan. Hal ini merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan narasumber.[23] Ketepatan memilih informan sangat menentukan, khususnya untuk mencapai tujuan dari penelitian. Maka dari itu pemilihan informan dilakukan dengan sengaja *(purposive sampling)*. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstrukur yaitu peneliti menggunakan draft pertanyaan yang telah dipersiapkan sesuai dengan permasalahan penelitian.[24] Teknik wawancara ini dilakukan dengan semua informan yang ada di lokasi terutama untuk mendapatkan data primer dari informan.

   Wawancara dilakukan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti tentang persepsi atau pandangan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana/mitigasi bencana di Kota Padang.

---

[23] Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, 1988. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, hal. 49.
[24] Sugiyono, 2005. *Memahami penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hal 72.

2. Studi Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerluakn interprestasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.[25] Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulakan data yang bersumber pada arsip dan dokumen yang ada pada masing-masing lokasi. Dokumen yang diteliti dapat berupa dokumen resmi dari kantor di Kecamatan Padang Barat, serta buku-buku, dan arsip-arsip lainnya untuk pemahaman peneliti terhadap konteks penelitian.

G. Uji Pengumpulan Data

Pada teknik ini maka peneliti melakukan proses triangulasi sumber data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsaan data, yang dimaksud dengan uji keabsahan data adalah usaha meningkatkan derajat kepercayaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.[26]

[25]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualiasasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal 97.
[26] Lexy J Meleong. Op.Cit, hlm. 178.

Triangulasi sumber data berusaha untuk membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Ini peneliti lakukan dengan mengamati terlebih dahulu fenomena yang terjadi di daerah melalui berbagai media kemudian diperiksa kembali kebenarannya dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Secara pribadi maksudnya wawancara yang dilakukan hanya antara peneliti dengan informan yang bersangkutan.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
d. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumentasi yang berkaitan.[27] Ini peneliti lakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan arsip-arsip atau surat-surat yang mereka miliki ataupun dari data yang peneliti temukan dilapangan.

[27] Ibid.

H. Analisis Data

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[28] Penelitian ini menggunakan interprestasi etik dan emik. Interprestasi etik adalah pengetahuan penelitian tentang permasalahan penelitian, sedangkan interprestasi emik ungkapan yang disampaikan informan berupa pendapat dan informasi menurut pandangannya sendiri.[29] Milles dan Hubbeman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaksi, terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Dalam menganalisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data-data yang diperoleh melalui wawancara yang telah diitulis dalam catatan, dokumen, arsip sebagai dokumentasi.
2. Mereduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat rangkuman secara inti dengan memilih hal-hal pokok.
3. Menyajikan data dengan cara mendeskripsikan secara keseluruhan dan memahami secara utuh dan mengambil kesimpulan.

[28] Ibid., hlm. 248.
[29] Ibid., hlm. 82-83.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Padang

4.1.1 Keadaan Geografis

Menurut letak geografinya, Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah administratif sekitar 1.414,96 km² terletak dipesisir pantai Barat Pulau Sumatera pada posisi astronomis antara 00° 05' 05'' BT – 100°34'09'' BT dan 00°44'00'' LS - 01°08'35'' LS. Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1980 dan Perda Nomor 10 Tahun 2005 wilayah administrasi Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 104 Kelurahan. Luas wilayah terdiri dari 694,96 km² daratan dan 720,00 km² peariran/laut yang merupakan hasil perluasan Kota Padang Tahun 1980, yaitu penambahan luas wilayah dengan 3 kecamatan dan 15 kelurahan.

Secara administratif daerah Kota Padang sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Jarak Kota Padang dengan kota-kota lain di Sumatera Barat yang terjauh adalah dengan Lubuk Sikaping yaitu sejauh 168 km, sedangkan yang terdekat adalah dengan Kabupaten Padang Pariaman yaitu berjarak 60 km.

Jika dilihat penggunaan tanah, maka 7,09% tanah di daerah kota Padang digunakan sebagai perumahan penduduk, 0,25% untuk perdagangan, 0,24% untuk industri dan 24,46% untuk area pertanian, sedangkan 55,04% masih merupakan hutan atau semak belukar (Padang dalam Angka, 2009). Disinilah letak besarnya peluang untuk melakukan perluasan pembangunan atau investasi yang sangat memungkinkan.

Batas - batas wilayah Kota Padang, adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- Menurut Perda Kota Padang Nomor 14 dan 15 Tahun 2004 telah ditetapkan sebanyak 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Berikut adalah tabel Kecamatan di Kota Padang beserta luasnya :

Tabel: 4.1.1

Kecamatan di Kota Padang beserta Luasnya

No.	Kecamatan	Luas (Km)	%
1.	Bungus Teluk Kabung	100,78	14,50
2.	Lubuk Kilangan	85,99	12,37
3.	Lubuk Begalung	30,91	4,45
4.	Padang Selatan	10,03	1,44
5.	Padang Timur	8,15	1,17
6.	Padang Barat	7,00	1,01
7.	Padang Utara	8,08	1,16
8.	Nanggalo	8,07	1,16
9.	Kuranji	57,41	8,26
10.	Pauh	146,29	21,05
11.	Koto Tangah	232,25	33,42
	Jumlah	694,96	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

4.1.2 Topografi Daerah

Berdasarkan posisi wilayah, Kota Padang secara fisik mempunyai ciri berbeda dengan kota-kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Ada 3 (tiga) ciri yang menonjol: Wilayah Pantai, yaitu seluruh wilayah pinggiran pantai berhadapan dengan Samudra Hindia. Wilayah Dataran Rendah, yaitu wilayah

yang sebagian besar sudah berkembang merupakan daerah pusat Kota Padang sebelum pemekaran Tahun 1980 dan sebagian wilayah kecamatan hasil pemekaran Tahun 1980. Wilayah Dataran tinggi, yaitu wilayah yang berada pada lereng Bukit Barisan yang melingkari Kota Padang.

Oleh karena itu, dilihat dari topografi daerah mempunyai karakteristik sangat bervariasi, dimana dipengaruhi ketiga kondisi wilayah diatas. Secara umum karakteristik Kota Padang perpaduan pantai, daratan dan perbukitan bergelombang yang curam. Ketinggian wilayah dari permukaan laut berada pada 0 meter sampai di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Kondisi tersebut terlihat terdapat wilayah dengan kelerengan lahan lebih besar dari 40. Kawasan dengan kelerengan lahan antara 0–2 terdapat di Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Koto Tangah. Kawasan dengan kelerengan lahan antara 2–15 tersebar di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Kawasan dengan kelerengan lahan 15–40 tersebar di Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kecamatan Koto Tangah. Sedangkan kawasan dengan kelerengan lahan >40 ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

4.1.3 Iklim

Suhu udara Kota Padang sepanjang tahun berkisar antara 22,0°C sampai 31,7°C dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 70 - 84 dengan curah hujan rata-rata sebesar 4.7619 mm, atau 385 mm/bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (776 mm) dan terendah pada bulan Mei (167 mm). Angin didominasi oleh angin Barat, Barat Daya, Barat Laut dengan kecepatan 1,6–5,6 knot bahkan kadang-kadang mencapai 5–40 knot. Dipengaruhi oleh angin musim maka arus permukaan di wilayah perairan Kota Padang sepanjang tahun mengalir ke arah Tenggara hingga Barat Daya (musim barat) dengan kekuatan arus antara 1–45 cm/detik. biasanya mencapai puncak pada bulan Desember. Arus musim timur antara bulan April hingga Oktober, melemah dengan kekuatan antara 1 cm/detik hingga 36 m/detik. Pada bulan Juli arus mencapai kekuatan minimum antara 1 cm/detik hingga 5 cm/detik. Selain itu di perairan Kota Padang juga terjadi arus pantai yang diakibatkan oleh gelombang. Arus ini berpengaruh terhadap abrasi dan sedimentasi pantai. Tinggi gelombang yang terjadi berkisar antara 0,5–2,0 meter.

4.1.4 Keadaan Demografis

Demografi/kependudukan menjadi hal penting dalam melihat kondisi dari penduduk disuatu daerah. Kota Padang yang merupakan ibu kota propinsi Sumatera Barat adalah pusat perekonomian, pendidikan, maupun pelabuhan bahkan juga pusat pariwisata. Kota Padang memiliki daya tarik bagi daerah sekitarnya, maupun daerah lainnya untuk menetapkan tempat beraktivitas sehingga menimbulkan arus perkembangan penduduk. Jumlah penduduk Kota Padang mengalami peningkatan seperti yang dijelaskan oleh tabel 2 berikut ini :

Tabel: 4.1.2
Jumlah Penduduk Kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		2006*	2007**	2008**	2010**
1.	Bungus Teluk Kabung	23.400	24.051	24.548	25.570
2.	Lubuk Kilangan	41.560	42.110	42.981	44.769
3.	Lubuk Begalung	100.912	101.363	103.460	107.765
4.	Padang Selatan	61.003	62.166	63.452	66.092
5.	Padang Timur	84.231	86.217	88.000	91.662
6.	Padang Barat	59.895	60.751	62.007	64.588
7.	Padang Utara	73.730	75.481	77.043	80.250
8.	Nanggalo	56.604	57.755	58.950	61.403

9.	Kuranji	113.976	114.428	116.796	121.656
10.	Pauh	51.354	53.095	54.193	56.448
11.	Koto Tangah	153.075	154.791	157.993	164.567
	Jumlah	**819.740**	**832.208**	**849.423**	**884.770**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat ,2006

* *angka direvisi*

** *angka proyeksi penduduk, BKKBN dan BPS Provinsi*

Jumlah penduduk Kota Padang tahun 2010 tercatat 884.770 jiwa dan penyebaran terbesar terdapat pada kecamatan Koto Tangah yaitu 164.567 jiwa atau sekitar 16,9 % di seluruh jumlah penduduk Kota Padang dengan luas wilayah 232,25 km. Selain itu kepadatan penduduk Kota Padang juga terlihat pada kecamatan Kuranji yaitu sebesar 121.656 jiwa atau sekitar 13,5 % dari jumlah penduduk, dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan kepadatan penduduk sebesar 25.570 jiwa dengan luas wilayah 100,78 km.

Gambaran umum data demografi menunjukan bahwa kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan terluas di Kota Padang yang luasnya 33,42 % dari keseluruhan wilayah kota Padang. Namun kepadatan penduduk di kecamatan tersebut hanya 695 jiwa/km2 Kepadatan penduduk kecamatan Koto Tangah memang lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Pauh (367 jiwa/km2) atau kecamatan Bungus Teluk Kabung (239 jiwa/km2) dan

kecamatan Lubuk Kilangan (506 jiwa/km2), namun tiga kecamatan terakhir sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan lindung. Dengan demikian arahan pusat pemerintahan ke wilayah kecamatan Koto Tangah akan membuka pusat pertumbuhan baru dan potensial sebagai upaya pengembangan kota dan distribusi penduduk.

Dari sisi sosial budaya, nilai positif dari aspek sosial budaya yang merupakan kultur dari masyarakat Kota Padang yang juga dimiliki oleh masyarakat Minangkabau pada umumnya adalah nilai kebersamaan, demokratis dan gotong-royong. Nilai tersebut diatas diharapkan akan dapat diaktualisasikan dengan baik dalam sistem pemerintahan nagari yang tengah dikembangkan saat ini di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan Kota Padang sebagai ibu kota provinsi.

Nilai positif ini harus terus ditumbuh-kembangkan dalam masyakat Kota Padang agar kota mampu tumbuh dan berkembang dengan daya-dukung segenap lapisan masyarakat. Apalagi di era otonomi daerah seperti sekarang ini, dimana daerah sangat dituntut untuk mampu menggali segala potensi ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki untuk dapat menggerakkan roda pembangunan dan mencapai masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Kota Padang menerapkan penerapan nilai-nilai agamis dalam segala aspek kehidupan warga kota. Pesantren ramadhan, zikir bersama, penerapan nilai-nilai islami masuk ke dalam dunia pendidikan dan birokrasi.

4.2 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan badan atau dinas yang dibebani tugas untuk mengurus dan mengatasi masalah- masalah yang berkaitan dengan bencana, sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 tahun 2008 yang berisikan tentang pembentukan organisasi dan tata cara BPBD Kota Padang, dan selanjutkan peraturan ini di perjelas lagi dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi BPBD Kota Padang.

BPBD kota padang beralamat di Jalan By Pass KM 7 Kelurahan Pasar Ambacang. Kedudukan BPBD Kota Padang berada di bawah dan dipertanggungjawabkan kepada Walikota Padang. BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. BPBD Kota Padang berperan utama dalam hal melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai sebuah badan penannggulangan bencana BPBD memiliki visi yakni terwujudnya masyarakat Kota Padang yang selalu siap siaga dalam menanggapi bencana, sedangkan misi BPBD sendiri yaitu meningkatkan manajemen dan pemberdayaan lembaga penanggulangan bencana, membangun budaya siaga bencana, mewujudkan ketahanan Fisik dan Lingkungan, dan mewujudkan ketahanan fisik dan

lingkungan untuk penanggulangan bencana. Adapun tugas pokok badan penanggulangan bencana daerah Kota Padang yaitu:

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan merata.
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
c. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, BPBD menyelenggarakan fungi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien.
b. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

4.3 Gambaran Umum Kecamatan Padang Barat.

Sebagai sebuah lembaga pelayanan masyarakat Kecamatan Padang Barat memiliki visi yakni terdepan dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan misi Kecamatan Padang Barat itu sendiri yaitu terwujudnya profesionalitas aparatur Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terciptanya sistem kerja yang handal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terciptanya hubungan yang harmonis dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, terciptanya peluang usaha yang kondusif diberbagai bidang pekerjaan.

BAB V

TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Mitigasi Bencana di Kota Padang

Sebagai daerah yang rawan bencana[30] diperlukan tindakan-tindakan antisipasi bencana. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah melalui Mitigasi Bencana *(Mitigate Disaster)*. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (9)). Kegiatan mitigasi bertujuan untuk meminimalisasi dampak ancaman dalam tahapannya kegiatan mitigasi dilakukan ketika kita telah melakukan identifikasi ancaman dengan program-program yang diprioritaskan untuk mengelola ancaman.

Kegiatan penanggulangan bencana adalah seluruh aspek kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum terjadi, saat terjadi, dan sesudah terjadi bencana yang dirancang untuk

[30] . Seperti yang dijelaskan para ahli seluruh dunia bahwa ratusan ribu jiwa penduduk berada dalam ancaman gempa bumi raksasa dan tsunami pada masa yang akan datang Di Provinsi Sumetra Barat dan Provinsi Bengkulu. Bukti-bukti ilmiah secara meyakinkan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut di masa yang akan datang sungguh akan terjadi dalam masa dekat ini, yang tentunya tidak dapat diketahui secara pasti. Mengingat gempa bumi besar yang telah terjadi dengan siklus pengulangan setiap kisaran peride dua abad dan peristiwa yang terakhir terjadi pada 172 tahun dan 208 tahun lalu, yaitu gempa besar yang pernah melanda Kepulauan Mentawai, sisi pantai barat Sumbar dan Bengkulu pada tahun 1797 dan 1833. (Kogami, 2009, p.4).

memberikan kerangka bagi orang perorangan atau komunitas yang berisiko terkena bencana untuk menghindari risiko, mengendalikan risiko, mengurangi risiko, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, tanggap darurat, rehabilitas dan rekontruksi.[31] Seperti yang dikatakan oleh Kasi Kesos dan penanggulangan bencana Kecamatan Padang Barat Ibuk Nuraini, B.A. yaitu:

> "Disaat gempa yang melanda kota padang tahun 2009 yang lalu rata-rata pada umumnya kenak bencana karena kekuatan gempanya 7,9 SR merubuhkan banyak bangunan di Kota Padang. Artinya mayoritas bangunan di Kota Padang tepatnya di bagian selatan yaitu kampung pondok dan berok nipah yang mengalami kerusakan yang paling parah dikarenakan gedung-gedung yang ada di daerah tersebut dibangun dengan struktur yang tidak mempunyai standar minimal ketahanan terhadap gempa".[32]

Pernyataan lain yang juga disampaikan oleh Bapak Fuji Astomy, S. ST selaku seksi Kesiapsiagaan di BPBD tentang Mitigasi bencana adalah:

> "Berbicara soal bencana kita harus tau bentuk-bentuk/potensi ancaman bencana yang ada di kota padang seperti; banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, abrasi pantai, dan kebakaran. Bencana itu terjadi karna ulah tangan

[31] . http://Petrasawacana.wordpress.com/2011/06/26/Kajian Teoritis Tentang Penanggulangan Bencana. Diakses pada tanggal 21 Maret 2012 pukul 12.00 wib.
[32]. Wawancara dengan Ibuk Nuraini B.A selaku Kasi Kesos dan Penanggulangan Bencana di Kecamatan Kota Padang.

> manusia yang lalai dalam menjaga dan melestarikan lingkungan bumi ini sehingga sang pencipta memberi teguran kepada umatnya melalui bencana alam ini. Bencana gempa pada tahun 2009 yang lalu itu adalah bencana yang cukup besar terjadi di kota padang sehingga banyak menyebabkan kerusakan yang sangat parah dan memakan korban jiwa yang cukup banyak pula. Pada saat sekarang ini pengurangan upaya resiko bencana merupakan suatu kegiatan yang penting dan perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat untuk saling bekerja sama dalam mengurangi resiko bencana alam.[33]

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana terdapat pembahasan tentang mitigasi bencana yang merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana yang nantinya dalam pelaksanaannya akan diserahkan kepada daerah masing-masing untuk membuat suatu peraturan khusus. Pengurangan risiko bencana di Kota Padang dibuat dalam pengadaan sistem peringatan dini, peraturan Walikota Padang Nomor 14 tahun 2010. Adapun pengadaan sistem peringatan dini di Kota Padang sesuai yang di utarakan oleh Bapak Fuji Astomy, S.ST seksi kesiapsiagaan BPBD, yaitu:

> "Upaya mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana di kota Padang 2009 BPBD selaku lembaga baru yang belum lengkap secara struktur, SDM, dan manajemen. Mulailah dilakukannya mitigasi utama yaitu peringatan dini di Kota Padang, melakukan

[33] . Wawancara dengan Bapak Fuji Astomy, S.ST sebagai seksi kesiapsiagaan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

> sosialisasi ke masyarakat dengan cara simulasi. BPBD itu sendiri tidak mempunyai kekuatan yang cukup mengerjakan setiap kebijakan penanggulangan bencana mesti bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah lainnya. Sehingga dalam penyatuan ide atau gagasan tentang upaya pengurangan risiko bencana yang berfokus kepada kesiapsiagaan tidaklah menjadi sulit.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibuk Nuraini, B.A sebagai Kasi Kesos dan Penaggulangan bencana di Kecamatan Padang Barat:

> "Dari lembaga pemerintah telah mengadakan peringatan dini dengan bantuan lembaga-lembaga non pemerintah berupa sosialisasi yang dilakukan ditiap-tiap kelurahan yang berpotensi bencana dengan cara melakukan simulasi, sosialisasi kemasyarakat oleh Walikota Padang melalui media elektronik agar masyarakat selalu waspada dengan ancaman bencana. Kita semua telah melihat bahwa pemerintah daerah memang harus dibantu dalam penanggulangan bencana ini agar pemerintah tidak mengalami kewalahan dalam menangani hal yang serius ini. Makanya kita semua harus menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah untuk mengatasi bencana, inikan juga termasuk meringankan tugas Pemko Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan Kasi Kesos dan Penanggulangan Bencana Kecamatan Padang Barat dan Seksi Kesiapsiagaan BPBD diatas, dapat kita ketahui bahwa pengurangan resiko bencana di Kota Padang mendapat perhatian yang serius, karena untuk menangani dan menanggulangi dampak bencana tersebut pemerintah Kota Padang telah mengambil beberapa tindakan dan membuat beberapa peraturan serta membagi bencana tersebut kedalam beberapa fase. Oleh karena itu

mengingat banyaknya kerugian dan dampak yang timbul akibat bencana tersebut, maka dibutuhkan suatu kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya dalam mengurangi resiko bencana kota padang yang meliputi berbagai keadaan pra bencana, saat terjadinya bencana, maupun setelah bencana itu terjadi.

5.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Mengurangi Resiko Bencana Di Kota Padang

Dalam mengembangkan sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat, terutama sistem-sistem dimana peringatan dini bisa diberikan tepat waktu dan dapat dipahami oleh mereka yang menghadapi risiko bencana. Pemerintah seharusnya secara berkala sistem informasi sebagai bagian sistem dini untuk memastikan bahwa tindakan yang cepat dan terkoordinir diambil pada waktu siaga atau keadaan darurat. Pemko padang telah membuat peraturan Walikota Padang Nomor 14 tahun 2010 tentang pelaksanaan suatu sistem peringatan dini tsunami kota padang sebagai wujud kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana gempa.

Pada Perwako ini dikatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan

terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu dalam menangggulangi bencana gempa bumi 30 September 2009 lalu pemerintah Kota Padang mempunyai sebuah peraturan sendiri yaitu peraturan daerah Kota Padang No.18 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Kota Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat BPBD dan Damkar adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Padang. Sesuai dengan pernyataan Bapak Fuji Astomy, S.ST yaitu:

> "Melihat sesuatu itu turunan dari pada undang-undang adalah perda dan perwako. Perda Kota Padang no 18 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja BPBD Kota Padang, kemudian Peraturan Wako Nomor tahun 2010 tentang pelaksanaan suatu sistem Peringatan dini tsunami kota Padang. Pada umumnya sistem peringatan dini kondisi bencana di kota padang harus mampu digunakan untuk pemberitahuan secara umum kemasyarakat serta dapat pula digunakan untuk melaporkan kejadian bencana kepada pusat pengendalian operasi (Pusdalops) kota Padang. Bagi yang ditujukan kepada masyarakat sistem peringatan dini ini harus memiliki sifat-sifat yaitu, pertama mampu memberikan informasi bencana apa yang sedang terjadi, kedua mampu memberikan informasi kemana orang harus melakukan evakuasi".[34]

[34] . Wawancara dengan seksi kesiapsiagaan BPBD kota Padang dengan Bapak Fuji Astomy pada tanggal 13 Maret 2013.

Di kota Padang sendiri telah terjadi beberapa kali gempa besar sejak beberapa tahun belakangan ini, artinya sudah bertahun-tahun tingkat kerawanan pantai barat Pulau Sumatera terhadap ancaman gempa dan tsunami. Seharusnya sudah ada program yang berfokus pada kesiapsiagaan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Padang yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tentang minimnya perhatian pemerintah terhadap edukasi kesiapsiagaan, seperti yang disampaikan oleh Deno warga Kelurahan Olo Ladang:

> "Selama ini kami belum dapat pelatihan atau informasi sekalipun dari pemerintah, padahal tempat tinggal kami sangat dekat dengan pantai. Kami menyelamatkan diri hanya berdasarkan insting atau naluri saja. kalau ada gempa yang besar dan kuat kami dengan sendirinya berlari kedaerah atau tempat yang lebih tinggi untuk menghindari terjadinya stunami".

Minimnya upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesipasiagaan masyarakat terlihat dari minimnya program-program penanggulangan bencana yang dilaksanakan dengan aksi nyata yang dapat menyentuh lapisan masyarakat Kota Padang. Dengan adanya Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang (BPBD) merupakan badan yang ditunjuk dan dibebani tugas untuk menangani segala jenis penanggulangan bencana di Kota Padang. Adapun tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam mitigasi bencana yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Derah Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan merata.
2. Membuat sistem peringatan dini berupa peraturan Wako Padang Nomor 14 Tahun 2010 tentang sistem peringatan dini tsunami Kota Padang.
3. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana dengan peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2011.
4. Meningkatkan fungsionalisasi dari pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana.
5. Memberikan sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat Kota Padang disertai dengan simulasi bencana.
6. Pemberdayaan masyarakat dengan membentuk kelompok siaga bencana pada tiap-tiap kelurahan yang ada di Kota Padang pada umumnya di kelurahan yang dekat dengan pesisir pantai.
7. Pembuatan data dan informasi bencana dalam bentuk peta dan petunjuk evakuasi bencana.
8. Pembangunan tempat-tempat evakuasi sementara (Tees) berupa shelter evakuasi tsunami Kota Padang.

Semua tugas pokok di atas merupakan pokok-pokok kewajiban yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh semua anggota instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam upaya mengatasi dan mengurangi risiko bencana yang terjadi. 8 uraian tugas pokok tersebut merupakan pedoman atau landasan bagi BPBD dalam melakasanakan tugas dan kewajibannya dalam menanggulangi bencana.

Berbicara soal pengurangan resiko bencana itu sangatlah penting untuk ditangani oleh pemerintah agar tidak lagi menimbulkan kerugian yang sangat besar serta menelan banyak korban jiwa, seperti yang terjadi pada bencana gempa september 2009 yang lalu, adapun kerusakan dan kerugian yang ditimbulkannya untuk lebih jelas lagi liat tabel dibawah ini:

Tabel: 5

REKAPITULASI KORBAN JIWA YANG TELAH DITEMUKAN

DAMPAK BENCANA GEMPA BUMI 7,9 SR DI KOTA

No.	Kecamatan	Korban Jiwa				
		Hilang	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Mengungsi
1.	Lubuk Kilangan	0	3	1	1	0
2.	Koto Tangah	1	20	3	130	0
3.	Kuranji	0	6	9	7	0
4.	Padang Barat	0	128	190	228	0
5.	Padang Utara	0	13	10	0	0

6.	Padang Selatan	0	20	15	12	0
7.	Padang Timur	0	68	139	182	0
8.	Nanggalo	0	17	10	128	0
9.	Lubuk Begalung	3	31	24	29	0
10.	Pauh	0	4	1	1	0
11.	Bungus Teluk Kabung	0	6	0	7	0
	Jumlah	4	383	431	771	0

Sumber: Data dari kantor BPBD

Dapat dijelaskan dari tabel diatas bahwa pada tanggal 30 September 2009 telah terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat mengguncang Kota Padang sehingga menelan banyak korban jiwa. Ada sebanyak 383 korban jiwa yang meninggal, 431 orang luka berat, 771 jiwa menderita luka ringan, dan 4 orang yang tidak ditemukan atau hilang. Diantara 11 kecamatan yang ada di Kota Padang, kecamatan yang paling banyak mempunyai korban jiwa yaitu Kecamatan Padang Barat, dan sebaliknya yang paling sediit ditemukan korban jiwa yaitu Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan.

Dalam menangani pengurangan resiko bencana gempa bumi yang terjadi september 2009 yang lalu, Pemerintah Kota Padang mencoba membangun sistem pemgurangan risiko acaman bencana berbasis masyarakat. Hal ini menjadi pnting karena keterbatasan pemerintah dan lembaga dalam upaya penyelamatan masyarakat dengan cara evakuasi dan simulasi untuk

menghadapi kemungkinan-kemungkinan terhadap ancaman bencana untuk kedepannya seperti yang dilontarkan oleh seksi kesiapsiagaan BPBD:

> "Bila terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami dengan ciri-ciri lamanya setelah satu menit manusia tidak bisa berdiri tegak dengan sempurna akibat goncangan gempa yang sangat kuat tersebut, struktur utama bangunan retak/hancur. Maka masyarakat segera melaksanakan evakuasi setelah gempa selesai dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan bermotor kearah daerah/bangunan yang jauh lebih tinggi yang memiliki ketinggian lebih dari delapan sampai sepuluh meter diatas permukaan laut dan tetap bertahan di daerah tersebut sambil menunggu informasi/pengumuman resmi dari Walikota melalui Radi dan sirine dengan bunyi tertentu.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibuk Nuraini, B.A Kasi Kesos dan penanggulangan bencana, yakni:

> "Setelah masyarakat melakukan evakuasi ketempat yang aman dan tinggi dan mendengar sirine peringatan dini dengan bunyi tertentu atau pengumumam melalui radio-radio oleh Walikota agar masyarakat slalu waspada dan tetap tenang sampai ada informasi resmi dari Pemerintah Kota".

Berdasarkan hasil wawacara diatas dapat kita ketahui bahwa dalam waktu dekat Kota Padang harus menurunkan tingkat kerentanan demi menurunkan risiko bencana. Khusus untuk kerentanan kelembagaan dan sumberdaya manusia, oleh karena itu Kota Padang berupaya melakukan berbagai terobosan-terobosan untuk mengurangi resiko bencana dengan

melakukan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Berbagai kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat diantaranya adalah rencana pembangunan 100 (seratus) sekolah selter vertikal, jalur evakuasi bagi masyarakat yang berada dan tersebar di wilayah pesisir Kota Padang yang berada di dataran rendah yang sangat rentan terhadap bencana tsunami. Rencana selanjutnya Kota Padang juga butuh lebih banyak lagi shelter-shelter evakuasi vertikal dan evakuasi horizontal untuk tempat evakuasi dan penampungan pengungsi yang lengkap dengan gudang-gudang barang dan logistik (buffer stock) sebagai antisipasi bahaya tsunami.

Terlihat dalam menjalankan tugasnya BPBD tidak sendiri, akan tetapi BPBD melakukan koordinasi dengan semua pihak agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan maksimal. Adapun program-program penanggulangan bencana yang telah dan akan dilakukan oleh BPBD[35] yaitu: Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1. Trauma helling/ pemulihan mental pasca gempa.
2. Pembuatan draft protap penanggulangan bencana PB.
3. Sosialisasi perencanaan bangunan tahan gempa.
4. Penunjang pelaksanaan dana bantuan langsung masyarakat korban gempa.
5. Perawatan berkala sirine peringatan dini tsunami.

[35] Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang

6. Penyusunan buku pedoman pemulihan dini masyarakat pasca gempa.
7. Penunjang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Upaya- upaya yang telah dilakukan oleh BPBD,yaitu :

1. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dini:
   a) Indentifikasi kerawanan bencana kota padang.
   b) Jalur evakuasi.
   c) Rambu evakuasi.
   d) Pembuatan tempat evakuasi seperti shelter.
   e) Sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
   f) Simulasi tsunami.

Sebagian masyarakat Kota Padang sudah merasakan manfaat adanya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui rambu-rambu di pinggir jalan Kota Padang. Rambu-rambu juga merupakan salah satu indikator yang dapat memperlihatkan bagaimana tingkat kesiapsiagaan Kota Padang Dalam menghadapi ancan bencana gempa dan tsunami jika terjadi. Ketersediaan jalur evakuasi ada dua macam cara yang dilakukan, yang pertama evakuasi vertikal yaitu ke gedung-gedung yang juga berfungsi sebagai shelter, dan evakuasi horizontal ketempat-tempat yang jauh dari pantai dan berada pada ketinggian yang aman dari tsunami. Kedua upaya penyelamatan diri ini membutuhkan jalur evakuais yang baik dan mencukupi untuk mobilitas

masyarakat yang ingin melewati jalan tersebut. Keadaan jalan di Kota Padang saat kejadian bencana penuh sesak dengan kendaraan yang ingin mengungsi sehingga menimbulkan kemacetan yang sanagt parah kendaraan nyaris tidak bisa berjalan. Hal ini tentu berisiko tinggi karena dapat membahayakan masyarakt yang memadati jalan tersebut.

Berdasarkan pengakuan salah seorang warga yang menjadi saksi hidup gempa 30 September 2009, Dayat:

> "Untuk mencapai daerah by pass saja sebagai tempat evakuasi dari andalas butuh waktu hampir satu jam. Ini disebabkan karena jalanan sangat macet susah dilalui walau berjalan kaki."

2. Upaya tanggap darurat:
   a) Mencari, menyelamatkan dan memindahkan korban yang masih hidup.
   b) Mencari dan evakuasi korban meninggal.
   c) Penerimaan dan penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana.
   d) Menghimpun data korban dan kerusakan akibat bencana.
   e) Pemulihan fasilitas kritis (Listrik, BBM, air bersih, sarana kesehatan, sarana pendidikan).
   f) Bantuan uang lauk pauk, khusus bagi korban yang rumahnya mengalami rusak berat.
3. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi:
   a) Perbaikan lingkungan daerah bencana.

b) Perbaikan sarana dan prasarana umum.

c) Pemberian bantuan dan perbaikan rumah masyarakat.

d) Pemulihan sosial psikologis.

e) Pelayanan kesehatan.

f) Pemulihan social ekonomi budaya.

g) Pemulihan keamanan dan ketertiban.

h) Pemulihan fungsi pemerintahan.

i) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Adapun penyusunan Prosedur Tetap (Protap) penanggulangan bencana Kota Padang dimaksudkan untuk memberikan satu dasar tindakan, komando, dan pengendalian dari berbagai stakeholder terkait dalam pelaksanaan peringatan dini penanganan darurat bencana yang terhubung langsung dengan sistem nasional dan secara terukur mampu mengurangi resiko yang mungkin timbuk akibat bencana yang datang. Lingkup pelaksanaan Protap ini adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Organisasi masyarakat maupun masyarakat itu sendiri dalam penyebaran peringatan dini serta penanganan darurat bencana di Kota Padang.

Dalam Undang-undang Penanggulangan Bencana Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat dalam penjalanan fungsi dan kewajiban Negara untuk melindungi segenap

Penduduk Indonesia. Undang-undang ini memuat empat konsep penting yang harus diselenggarakan dalam proses penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. Konsep tersebut adalah :

1) Pernyataan Kebijakan Penanggulangan Bencana yang diamanatkan dalam undang- undang adalah :

   a. Perlindungan dari resiko bencana.

   b. Penanggulangan Bencana harus dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, terkoordinasi dan menyeluruh.

   c. Pemerintah harus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia.

2) Pergeseran Paradigma dalam penanggulangan bencana

Pola pikir dan tindak dalam penanggulangan bencana yang selama ini berlaku di Indonesia harus digeser kearah yang lebih efektif sehingga mampu meminimalkan dampak negatif dari kejadian bencana. Pergeseran paradigma tersebut pada dasarnya adalah merubah :

   a. Paradigma fatalistik-reaktif dalam penanggulangan bencana menjadi paradigma terencana-proaktif.

   b. Paradigma penanggulangan bencana hanya merupakan aktivitas tanggap darurat saat terjadi bencana saja harus diubah menjadi

paradigma bahwa penanggulangan bencana merupakan proses pengurangan resiko bencana pada masa sebelum, saat dan setelah terjadi bencana.

c. Paradigma sentralisasi dalam penanggulangan bencana harus digeser kearah pemberian otonomi pada daerah.

d. Pola *government-centric* harus diubah menjadi pola partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah.

Pergeseran paradigma tersebut didasari dari pemikiran bahwa :

a. Perlindungan merupakan hak dasar (asasi) umat manusia.

b. Pengurangan resiko bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan.

3) Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

b. Untuk itu dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setingkat menteri; Badan Daerah Penanggulangan Bencana, pada tingkatan provinsi dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon 1B dan pejabat setingkat 2A pada tingkatan kota/kabupaten.

c. Tugas terintegrasi dengan dua fungsi : fungsi koordinasi untuk masa pra-bencana dan pasca-bencana dan fungsi komando pada masa tanggap darurat bencana.

d. Memadukan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.

e. Mengalokasikan dana yang memadai pada APBN dan APBD.

4) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi:

a. Prabencana

b. Saat bencana darurat, dan

c. Pascabencana

Penyelenggaraan ketika bencana dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada didalam dokumen protap ini sesuai dasar Hukum yang berlaku meliputi kegiatan:

a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya.

b. Penentuan status keadaan darurat bencana.

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.

d. Pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Perlindungan terhadap kelompok rentan.

f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.[36]

Terlepas dari semua yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakanan mitigasi bencana ternyata masih menimbulkan pro dan kontra, dimana ada sebagian dari masyarakat yang masih belum percaya fungsi shelter atau tempat evakuasi yang disediakan oleh pemerintah di kota padang, seperti yang di katakan oleh Ibuk Ipah:

> "Kalo alah gampo tu ndak tantu awak kama kalari lai, ndak ado pangana lari katampek nan tinggi doh "
> (Kalau sudah gempa tidak tahu kita kemana mau lari lagi, tidak fikiran lari ketempat yang tinggi).

Menurut pendapat Pak Eri:

> "Sabananyo masyarakat ko ado yang ndak tau soal pembangunan shelter tu, ado loh yang alah tau tapi masih kurang pacayo samo kekuatan bangunan apo bilo tajadi goncangan yang sangat kancang. Keuntungan adonyo shelter ko bia jalan ndak menyebabkan macet total karano urang pado balari ka daerah yang labiah tinggi, contohnyo ka kampus Unand limau manih, ka Indaruang, dan ka By pass."[37]
> (sebenarnya masyarakat ini ada yang tidak tahu soal pembangunan shelter itu, ada juga yang sudah tahu tapi masih kurang percaya sama kekuatan bangunan apa bila terjadi goncangan yang sangat kuat. Keuntungan adanya shelter ini biar jalan tidak menyebabkan macet total karena orang pada berlari ke daerah yang tinggi,

[36]. Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana Kota Padang.
[37] Wawancara dengan anggota masyarakat yaitu dengan ibuk Ipah pad a tanggal 14 Maret 2013.

contohnya ke kampus Unand limau manis, ke Indarung, dan ke By pass.)

Pak Yasri juga berpendapat lain yaitu :

> "Pada umumnya masyarakat Kota Padang kalau mendengar suara sirine sebagai peringatan dini atau pengumuman dari Pemerintah Kota, itu pertanda bahwa akan dilakukannya evakuasi ketempat atau daerah yang lebih tinggi dan jauh dari zona merah. Sehingga masyarakat tidak pernah terfikirkan untuk lari ke gedung yang lebih tinggi. Misalnya Basko grand mall itu gedung yang bisa di jadikan sebagai shelter untuk menyelamatkan diri, tapi ternyata masyarakat tidak memanfaatkannya karena sewaktu-waktu bangunan itu akan ambruk dan masyarakat lebih memilih untuk menjauh dari daerah yang dekat dengan pantai."[38]

Berbeda dengan pemikiran ibuk Ipah dan pak Eri ada sebagian masyarakat yang mendukung dan memuji upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pengurangan resiko bencana, yaitu seperti pendapat Ibuk Sriwahyuni:

> "Pemerintah Kota Padang sudah cukup baik ya dalam melaksanakan kegiatannya terhadap penanggulangan bencana berupa upaya pengurangan resiko bencana dalam menghadapi situasi gempa, dimana sudah adanya pembangunan gedung-gedung sebagai shelter evakuasi bagi masyarakat yang berada di zona ancaman bencana agar masyarakat tidak perlu berlari jauh untuk menghindarkan macet dalam perjalanan. Juga ada plang-plang jalur evakuasi bencana ditiap-tiap ruas jalan Kota Padang."[39]

[38] Wawancara dengan anggota masyarakat yaitu dengan pak Eri pad a tanggal 14 Maret 2013.
[39] Wawancara dengan anggota masyarakat yaitu dengan pak Yasri pada tanggal 14 Maret 2013.

Pernyataan yang senada juga terlontar dari beberapa pegawai pemerintahan daerah yaitu yang sehari-harinya bekerja sebagai pegawai negeri di kantor Pemerintahan Daerah Mas Ridwan:

> "Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk mengurangi resiko bencana sudah baik tapi kendalanya cuma masalah dana yang belum cukup untuk pembangunan, jadi mungkin disitu letaknya kenapa masih ada bangunan-bangunan yang masih dalam perencanaan untuk sebagai tempat evakuasi."[40]

Berdasarkan beberapa pendapat dan fakta diatas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Padang dimana BPBD sebagai pelaksana berusaha semaksimal mungkin melakukan prosedur dan perencanaan matang untuk penanggulangan bencana sebaik-baiknya baik mengenai dana, teknis, maupun sarana dan prasarana. Persoalan dan menjadi alasan utama ketika permasalahan upaya pengurangan resiko bencana melalui sistem peringatan dini ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pengalaman gempa yang sudah beberapa kali terjadi di Kota Padang seharusnya membuat pemerintah bergerak cepat untuk membenahi sistem peringatan dini ini sebagai upaya pengurangan resiko bencana dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana, sistem peringatan dini yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi

[40] Wawancara dengan anggota masyarakat yaitu dengan ibuk Sriwahyuni pad a tanggal 14 Maret 2013.

keharusan yang tidak bisa di tawar lagi apalagi dengan tingginya potensi ancaman bencana gempa dan tsunami di Kota Padang. Akan tetapi karena program penanggulangan bencana masih baru di Kota Padang tentu dalam pelaksanaanya masih banyak terdapat kendala-kendala, hal inilah yang membuat masyarakat mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang pengurangan resiko bencana atau mitigasi bencana di Kota Padang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6. 1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan mengenai upaya penanganan pengurangan resiko bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang. Penelitian ini berupaya menjelaskan dan menggambarkan peran serta Pemerintah Kota Padang dalam upaya pengurangan resiko bencana Kota Padang. Upaya pengurangan resiko bencana bukan mencegah bencana karena bencana tidak akan bisa dicegah oleh siapapun. Pengurangan resiko bencana yang dilakukan di Kota Padang merupakan langkah atau prosedur- prosedur yang dilakukan dalam menangani ketika bencana terjadi, baik sebelum saat terjadinya bencana ataupun sesudah bencana itu terjadi. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada masyarakat dan pemerintah Kota Padang tentang bagaimana upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukannya dalam bencana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang secara garis besar sudah mulai serius memperhatikan dan menangani kesiapsiagaan sebagai unsur penting dalam penanggulangan bencana dengan telah diinisiasikannya berbagai program kesiapsiagaan. Paradigma mitigasi bencana difokuskan pada pengenalan daerah rawan ancaman bencana dan pola prilaku individu/masyarakat yang rentan terhadap bencana.

2. Masyarakat harus mempunyai pengetahuan tentang kesiapsiagaanm pemahaman bencana alam, pemaham tentang kerentanan lingkungan, pemahaman tentang kerentanan bangunan fisik dan fasilitas untuk keadaan darurat bencana. Masyarakat harus memiliki sikap peduli terhadap lingkungan yang rawan terhadap bencana. Dengan adanya upaya pemerintah dalam pengurangan risiko bencana masyarakat agar segera melakukan evakuasi kedaerah yang aman, setelah itu masyarakat harus mendengarkan semua informasi dari Pemerintah Kota
3. Di sisi lain koordinasi BPBD Kota Padang merupakan badan yang dibentuk dan dibebani tugas menanggulangi masalah bencana dengan instruksi dan komando dari pimpinan dikarenakan BPBD sebagai *leading sector* penanggulangan bencana.
4. Dari hasil analisis secara umum edukasi masyarakat sudah mulai dilakukan walaupun belum ada pemerataan edukasi secara menyeluruh, padahal masih banyak lapisan masyarakat lain yang membutuhkan edukasi. Sementara itu pembangunan dan pembenahan bangunan masih terus dilakukan, mengingat kerentanan Kota Padang yang tinggi terhadap ancaman bencana berupa gempa dan tsunami. Kendala yang ditemui oleh Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat adalah masih banyaknya bangunan-bangunan yang rentan terhadap bencana, jalur dan lokasi evakuasi yang sudah mulai memadai seperti shelter evakuasi sebagai sistem peringatan dini yang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Padang secara luas.

5. Mengingat baru dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Padang yang belum lengkap secara struktur, Sumber daya manusia, dan manajemen secara dalam hal operasional, teknis, sarana dan prasarananya masih terbatas, hal ini yang menjadi kendala bagi BPBD dalam melaksanakan tugasnya

6.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti akan memberikan saran untuk upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami maka perlu dilakukan:

1. Diharapkan kepada pihak terkait, yaitu pemerintah Kota Padang dan BPBD khususnya lebih fokus pada aspek kesiapsiagaan serta melengkapi segala hal yang diperlukan dalam melakukan penanggulangan bencana, bertindak cepat dan siap siaga terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Program yang terkait dengan upaya pengurangan resiko bencana terhadap masyarakat perlu ditingkatkan dan diperbanyak lagi.
2. Koordinasi antar masing-masing lembaga penanggulangan bencana perlu diperkuat dengan mengoptimalkan fungsi BPBD Kota Padang sebagai koordinator.
3. Diharapkan pada pemerintah Kota Padang lebih memainkan peran

aktifnya dalam mengurangi resiko bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang.

4. Diharapkan kepada pemerintah Kota Padang lebih bersikap transparansi dan mampu menjalankan tugas dengan semestinya dalam menanggulangi bencana di Kota Padang.
5. Perlunya informasi yang merata dalam edukasi kesiapsiagaan bencana agar dapat merata sampai ke seluruh lapisan masyarakat Kota Padang dengan melakukan edukasi secara berkala agar budaya siap siaga bencana terbentuk. Pembangunan gedung-gedung sebagai shelter evakuasi harus diselesaikan secepatnya mengingat begitu rentannya Kota Padang terhadap ancaman bencana khususnya bencana gempa bumi dan tsunami yang bisa datang kapan saja. Ketersediaan fasilitas yang memadai secara tidak langsung juga menunjang kesiapsiagaan masyarakat bisa mengurangi jatuhnya korban jiwa ketika bencana terjadi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Babbie, Earl. *"Menerapkan Metode Penelitian Survey Untuk Ilmu Sosial"*. Yogyakarta: Palmall.

Bungin, Burhan. 2003. *"Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Maleong, Lexy J. 1999. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Musa, Muhammad Dan Titi Nurfitri. 1988. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Fajar Agung.

Moenir, H.A.S. 1955. *"Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia"*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2005. *"Memahami Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftha. 2002. Perilaku Organisasi: *Konsep Dasar dan Aplikasinya.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

SkripsidanLaporanPenelitian

Muktaf Haifani Akhmad. 2006. "Manajemen Risiko Bencana Gempa Bumi (Studikasus gempa bumi Yogyakarta 2006)".*Seminar Nasional IV Teknologi Nuklir Yogyakarta.*

Zikri Alhadi. 2009."Upaya Pemerintah Kota Padang Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami (Suatu studi Manajemen Bencana) ".

Soraya Oktarina. 2010. "Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Upaya Penanganan Dampak Bencana Pasca Gempa 30 September 2009 di Kota Padang".

PeraturandanUndang-undang

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang PenanggulanganBencanaAlam.

Sumber media elektronik:

EkaDanta Jaya Ginting. 2003. *HubunganPersepsiterhadap Program* PengembanganKarirdenganKompetensiKerja, (online), (http://library.usu.ac.id/),diakses 20 November 2010

Walhi. 2009. MasalahPendistribusiaBantuandanKetidakpuasanPenanggulanganBencana, (online), (www.gempasumatera.net) diakses 10 Januari 2010

PedomanPenangananPascaBencana, (online), (www.bakornaspb.go. id), diaksespada5 Januari 2010.

Http://landspatial.bappenas.go.id/peraturan/the file/UU no. 24 tahun 2007.pdf. Diakses pada tanggal 22 desember 2010.

Politik Bumi dan Manajemen bencana dalam jurnal dialog kebijakan publik edisi 1 juni tahun II 2008.

Http://Petrasawacana.wordpress.com/2011/06/26 Kajian Teoritis Tentang Penanggulangan Bencana. Diakses pada tanggal 21 Maret 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Serly Fitriana
No. BP	: 06993017
Tempat/Tgl Lahir	: Belubus/18 Mei 1988
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Belubus Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota
E-mail	: Sherly_fisip@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

2006 -2013	: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (S1) Universitas Andalas Jurusan Ilmu Politik
2003 - 2006	: Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kecamatan Guguk
2001 - 2003	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 Kuranji, Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota
1995 - 2001	: Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Sungai Talang Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266, *e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id*

Nomor : 341 /UN16.08.WD I/PP/2013 25 Februari 2013
Hal : **Izin Penelitian.**

Kepada Yth. .....
.....
di
.....

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas ;

Nomor Bp.	:	06993017
Nama	:	Sherly Fitriana
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Politik
Alamat	:	
Dengan Judul	:	Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang
Waktu	:	2 Bulan
Lokasi	:	Kecamatan Padang Barat
Dalam Rangka	:	Penulisan Skripsi

Untuk melaksanakan penelitian/survai awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Disamping itu kami juga mengaharapkan bantuan saudara dapat memberikan *izin/rekomendasi* seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. D e k a n
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Afrizal, MA
NIP. 19620520 198811 1 001

Tembusan:
1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN PADANG BARAT

Jalan Veteran No. 85 Padang, Telepon 27471

Nomor : 070.17.174/CPB/2013 Padang, 8 Maret 2013
Perihal : ***Hasil Penelitian/ survey akhir***

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Ilmu Politik

Universitas Andalas Padang

Di

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan izin untuk melakukan penelitian/ survey tugas akhir tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang atas nama :

Nama	: **Sherly Fitriana**
Tempat / Tgl. Lahir	: Belubus/ 18 Mei 1988
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Jl. M. Hatta no. 33 Anduring Padang
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Waktu / Lama Penelitian	: 2 (dua) bulan
Judul Penelitian/Survey	: **Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang.**
Lokasi Penelitian	: Kecamatan Padang Barat
Anggota	: -

Telah melaksanakan penelitian/ survey tugas akhir di Kecamatan Padang Barat selama 2 (dua) bulan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang.

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

An. CAMAT
Kasi Pemerintahan

PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN PADANG BARAT

ROZA MOLINA, S.STP. M.SI
NIP 19810326 199912 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Yang bersangkutan

PEMERINTAH KOTA PADANG

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070 03.480Kesbangpol/2013

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

1. Undang-Undang No.18 Tahun 2002 dan Permendagri No.33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian.
2. Surat dari : Wakil Dekan I FISIP Unand Padang.

   Nomor : 341/Un16.08.WD I/PP/2013 tanggal 25 Februari 2012

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ysb. tanggal 05 Maret 2013

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	:	**SHERLY FITRIANA**
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Belubus/18 Mei 1988
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Alamat	:	Jl.Dr.M.Hatta No.33 Anduring Padang
Maksud Penelitian	:	Untuk Penulisan Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL	:	Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang.
Lama Penilitian	:	2 (dua) bulan
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL	:	Kecamatan Padang Barat.
Anggota Rombongan	:	

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 05 Maret 2013

An. Kepala

KASI BINA IDEOLOGI DAN WASBANG

PEMERINTAH KOTA PADANG KANTOR KESBANG POL

JHON ISMED,SH

NIP.19630227198509 1 002

Diteruskan : kepada Yth.

1. Kepala BPBD dan Damkar Kota Padang.
2. Camat Padang Barat.
3. Wakil Dekan I FISIP Unand Padang.
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.

JALUR DAN TITIK EVAKUASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266, *e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id*

Nomor : 341 /UN16.08.WD I/PP/2013 25 Februari 2013
H a l : **Izin Penelitian**

Kepada Yth. .....

.....

di

.....

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas ;

Nomor Bp.	:	06993017
Nama	:	Sherly Fitriana
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Politik
Alamat	:	
Dengan Judul	:	Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang
Waktu	:	2 Bulan
Lokasi	:	Kecamatan Padang Barat
Dalam Rangka	:	Penulisan Skripsi

Untuk melaksanakan penelitian/survai awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Disamping itu kami juga mengaharapkan bantuan saudara dapat memberikan *izin/rekomendasi* seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. D e k a n
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Afrizal, MA
NIP. 19620520 198811 1 001

Tembusan:
1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN PADANG BARAT

Jalan Veteran No. 85 Padang, Telepon 27471

Nomor : 070.17.174/CPB/2013 Padang, 8 Maret 2013
Perihal : ***Hasil Penelitian/ survey akhir***

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Ilmu Politik

Universitas Andalas Padang

Di

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan izin untuk melakukan penelitian/ survey tugas akhir tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang atas nama :

Nama	: **Sherly Fitriana**
Tempat / Tgl. Lahir	: Belubus/ 18 Mei 1988
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Jl. M. Hatta no. 33 Anduring Padang
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Waktu / Lama Penelitian	: 2 (dua) bulan
Judul Penelitian/Survey	: **Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang.**
Lokasi Penelitian	: Kecamatan Padang Barat
Anggota	: -

Telah melaksanakan penelitian/ survey tugas akhir di Kecamatan Padang Barat selama 2 (dua) bulan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang.

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

An. CAMAT
Kasi Pemerintahan

ROZA MOLINA, S.STP. M.SI
NIP. 19810326 199912 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Yang bersangkutan

PEMERINTAH KOTA PADANG

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070 03.480Kesbangpol/2013

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

1. Undang-Undang No.18 Tahun 2002 dan Permendagri No.33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian.
2. Surat dari : Wakil Dekan I FISIP Unand Padang.

Nomor : 341/Un16.08.WD I/PP/2013 tanggal 25 Februari 2012

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ysb. tanggal 05 Maret 2013

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	:	**SHERLY FITRIANA**
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Belubus/18 Mei 1988
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Alamat	:	Jl.Dr.M.Hatta No.33 Anduring Padang
Maksud Penelitian	:	Untuk Penulisan Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL	:	Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang.
Lama Penilitian	:	2 (dua) bulan
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL	:	Kecamatan Padang Barat.
Anggota Rombongan	:	

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 05 Maret 2013

An. Kepala

KASI BINA IDEOLOGI DAN WASBANG

JHON ISMED,SH

NIP.19630227198509 1 002

Diteruskan : kepada Yth.

1. Kepala BPBD dan Damkar Kota Padang.
2. Camat Padang Barat.
3. Wakil Dekan I FISIP Unand Padang.
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.

Peta & Petunjuk Jalur Evakusi serta Zona Relokasi yg Dipasang di berbagai lokasi di Kota Padang

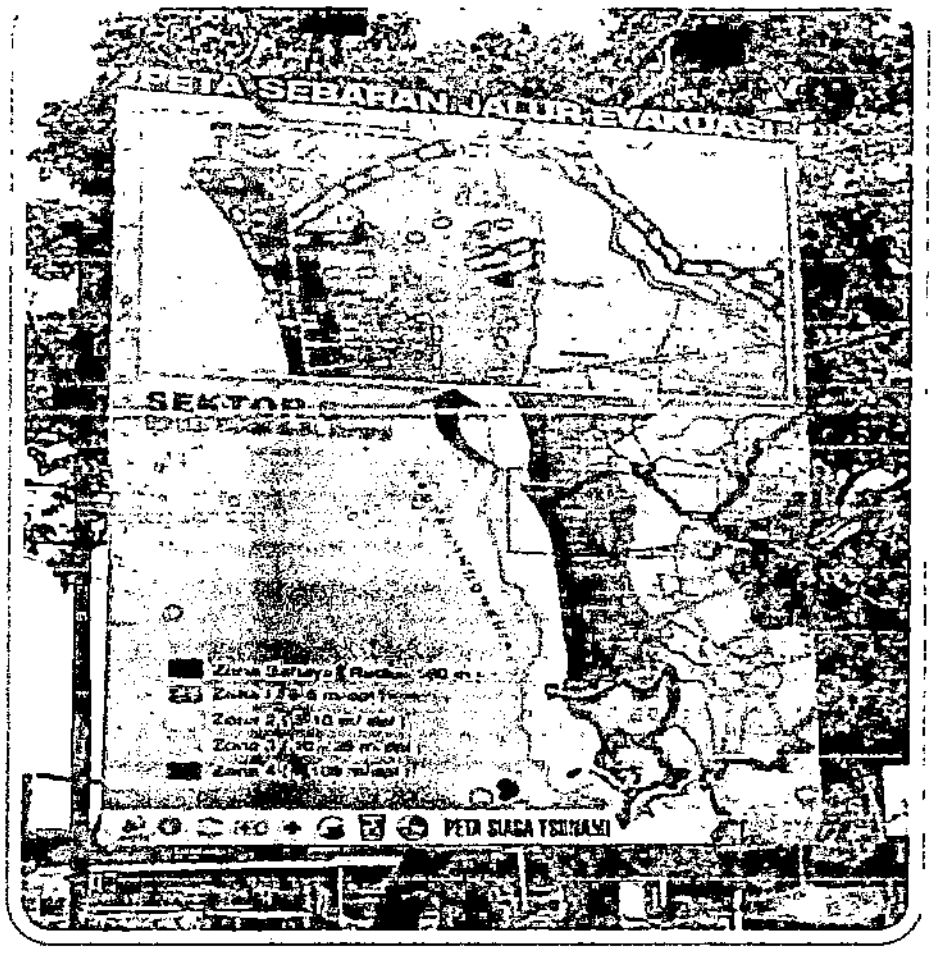

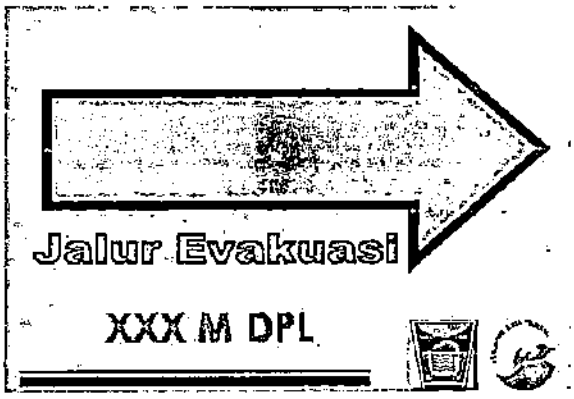

Membangun sekolah yang juga berfungsi sebagai shelter

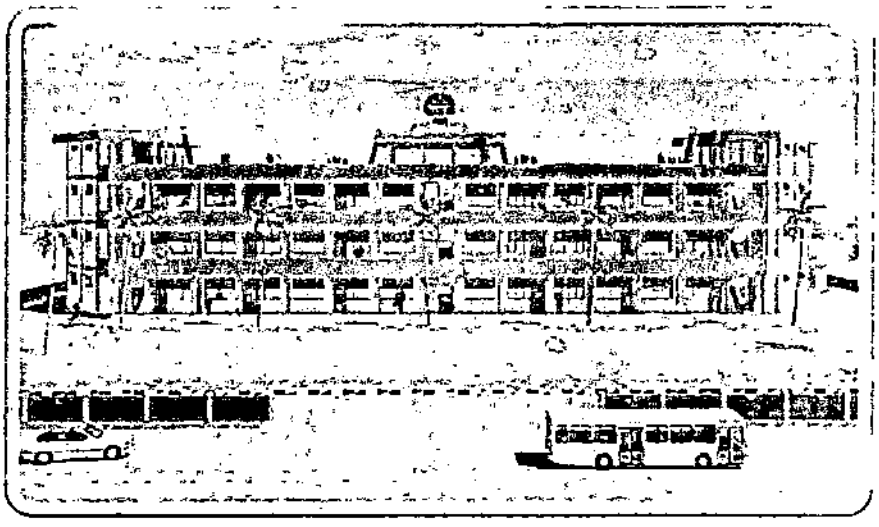

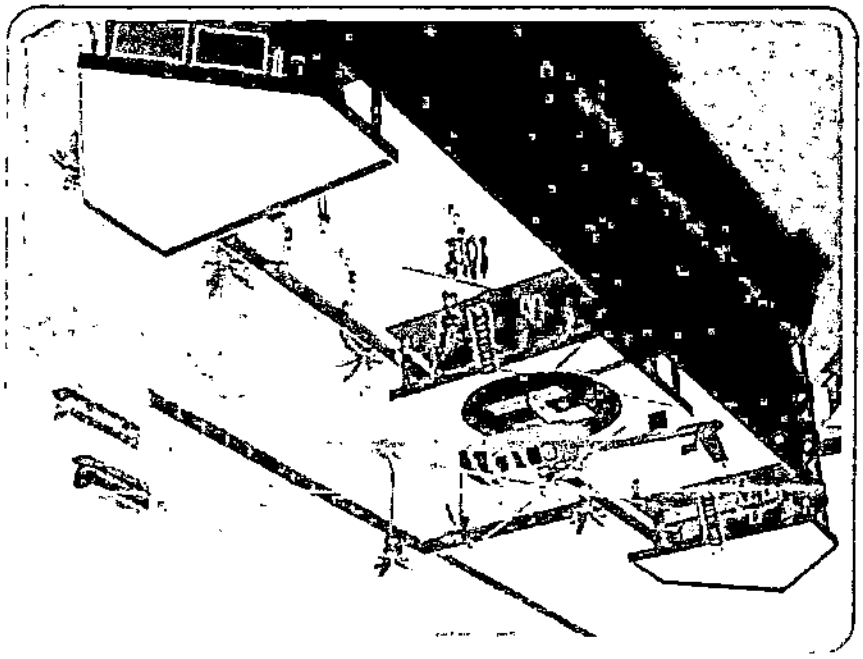

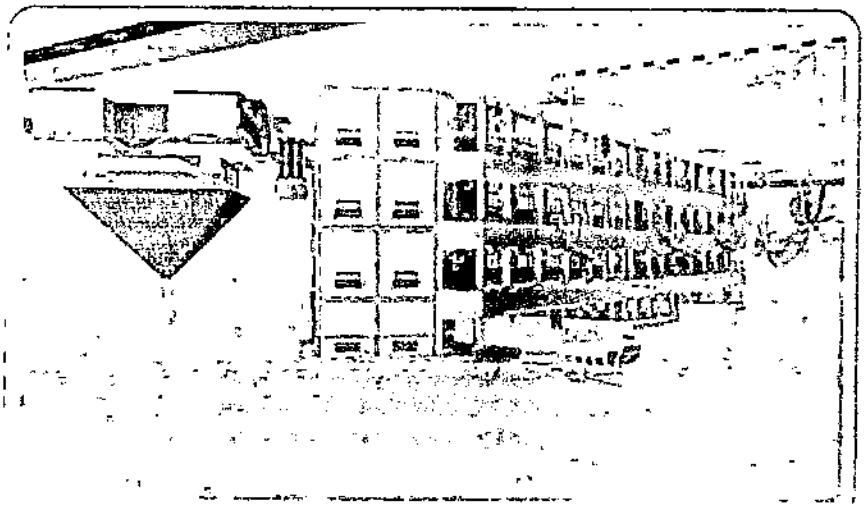

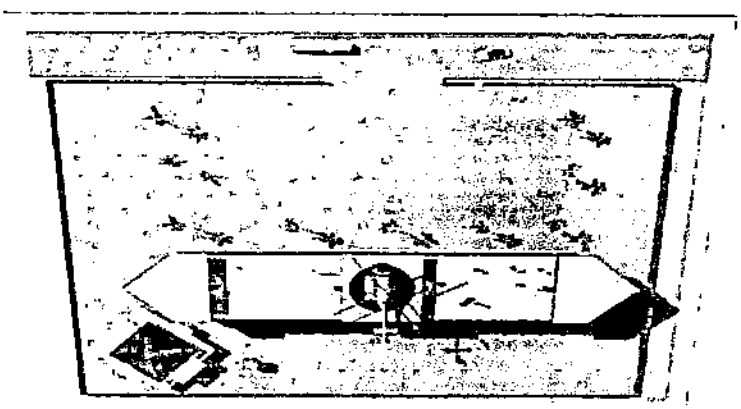

PENGKREKELAN EVAKUASI KE BUKIT/KETINGGIAN

(SEI PISANG)

PENGKREKELAN EVAKUASI KE BUKIT/KETINGGIAN

(TL. KABUNG SEI PISANG)

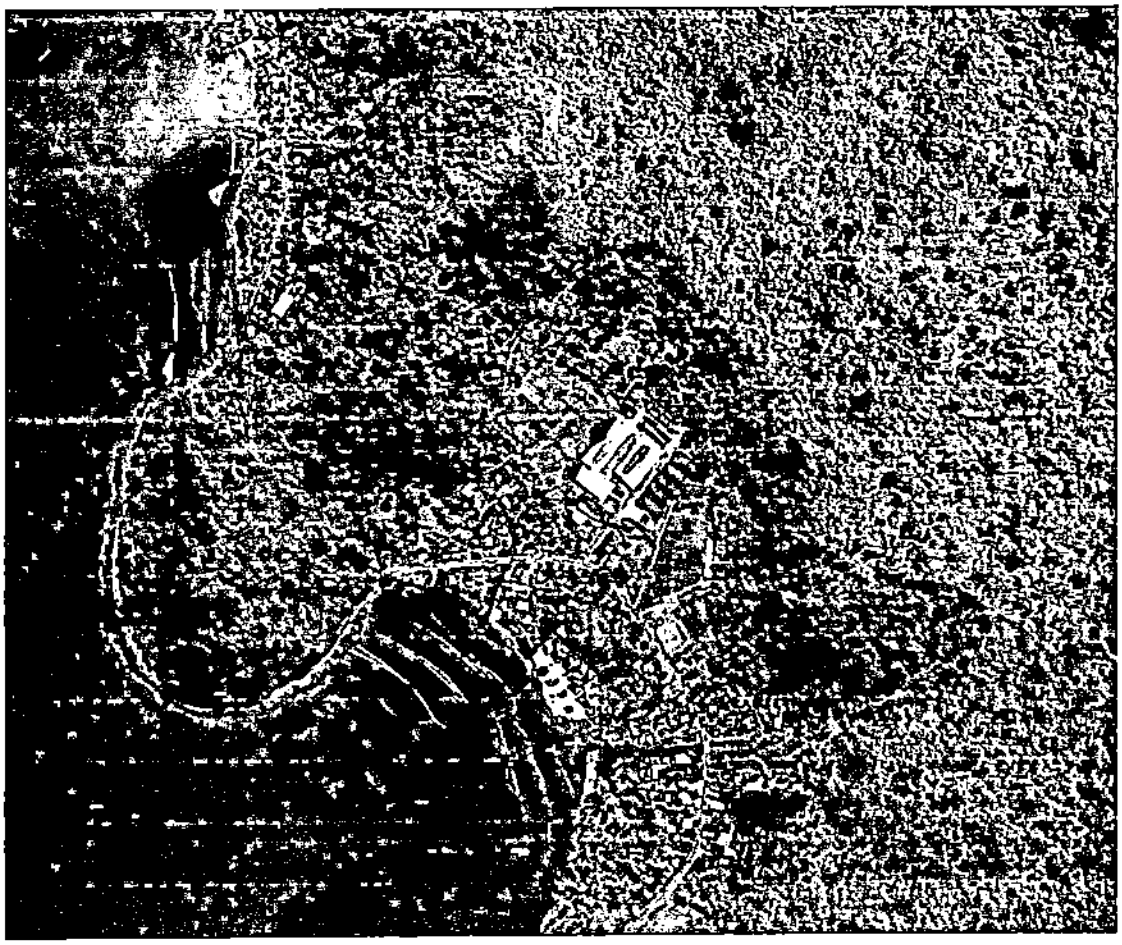

PENGKREKELAN EVAKUASI KE BUKIT/KETINGGIAN

(BUNGUS BARAT)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya mahasiswi Universitas Andalas yang bernama :

Nama : Serly Fitriana

No. Bp : 06993017

Jurusan : Ilmu Politik

Telah melakukan penelitian terkait penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang" dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian yakni :

Nama : Nuraini, B.A.

Pekerjaan : Kasi kesos dan penanggulangan Bencana di kecamatan padang barat.

Tempat wawancara : kantor camat padang Barat

Demikian surat keterangan wawancara ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Padang, 6 Maret 2013

Mengetahui

Informan Penelitian

PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN PADANG BARAT

(NURAINI, B.A)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya mahasiswi Universitas Andalas yang bernama :

Nama : Serly Fitriana

No. Bp : 06993017

Jurusan : Ilmu Politik

Telah melakukan penelitian terkait penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang" dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian yakni :

Nama : Fuji Astomy, SST

Pekerjaan : Seksi kesiapsiagaan

Tempat wawancara : kantor BPBD KOTA PADANG

Demikian surat keterangan wawancara ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Padang, 13 Maret 2013

Mengetahui

Informan Penelitian

(FUJI ASTOMY, S.ST)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya mahasiswi Universitas Andalas yang bernama :

Nama : Serly Fitriana

No. Bp : 06993017

Jurusan : Ilmu Politik

Telah melakukan penelitian terkait penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang" dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian yakni :

Nama : Asprizul, B.A.

Pekerjaan : Ketua Lurah

Tempat wawancara : Dirumah Jln Purus 1. no 1. PADANG

Demikian surat keterangan wawancara ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Padang, 3 APRIL 2013

Mengetahui

Informan Penelitian

(ASPRIZUL, B.A.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya mahasiswi Universitas Andalas yang bernama :

Nama : Serly Fitriana

No. Bp : 06993017

Jurusan : Ilmu Politik

Telah melakukan penelitian terkait penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang" dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian yakni :

Nama : IPAH

Pekerjaan : IRT.

Tempat wawancara : Jln. Purus 1 dalam No. 5

Demikian surat keterangan wawancara ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Padang, 3 APRIL 2013

Mengetahui

Informan Penelitian

(IPAH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya mahasiswi Universitas Andalas yang bernama :

Nama : Serly Fitriana

No. Bp : 06993017

Jurusan : Ilmu Politik

Telah melakukan penelitian terkait penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang" dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian yakni :

Nama : Eri Siswanto

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat wawancara : Jln. Purus. I No. 9 Padang

Demikian surat keterangan wawancara ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Padang, 14 Maret 2013

Mengetahui

Informan Penelitian

(ERI SISWANTO)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya mahasiswi Universitas Andalas yang bernama :

Nama : Serly Fitriana

No. Bp : 06993017

Jurusan : Ilmu Politik

Telah melakukan penelitian terkait penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang" dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian yakni :

Nama : Yasri Anwar

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat wawancara : Jln. Purus . II .No 14 Padang

Demikian surat keterangan wawancara ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Padang, 14 Maret 2013

Mengetahui

Informan Penelitian

(YASRI ANWAR)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya mahasiswi Universitas Andalas yang bernama :

Nama : Serly Fitriana

No. Bp : 06993017

Jurusen : Ilmu Politik

Telah melakukan penelitian terkait penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang" dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian yakni :

Nama : Sriwahyuni

Pekerjaan : IRT

Tempat wawancara : Jln. Olo ladang No. 10 Padang

Demikian surat keterangan wawancara ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Padang, 14 Maret 2013

Mengetahui

Informan Penelitian

(SRIWAHYUNI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya mahasiswi Universitas Andalas yang bernama :

Nama : Serly Fitriana

No. Bp : 06993017

Jurusan : Ilmu Politik

Telah melakukan penelitian terkait penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang" dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian yakni :

Nama : Ridwan Santoso

Pekerjaan : PNS

Tempat wawancara : Jln. Purus 1. No 2 Padang

Demikian surat keterangan wawancara ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Padang, 15 Maret 2013

Mengetahui

Informan Penelitian

(RIDWAN SANTOSO)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya mahasiswi Universitas Andalas yang bernama :

Nama : Serly Fitriana

No. Bp : 06993017

Jurusan : Ilmu Politik

Telah melakukan penelitian terkait penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang" dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian yakni :

Nama : Sari Marni

Pekerjaan : IRT

Tempat wawancara : Jln. Olo Ladang

Demikian surat keterangan wawancara ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Padang, 16 Maret 2013

Mengetahui

Informan Penelitian

(SARI MARNI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya mahasiswi Universitas Andalas yang bernama :

Nama : Serly Fitriana

No. Bp : 06993017

Jurusan : Ilmu Politik

Telah melakukan penelitian terkait penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Padang" dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian yakni :

Nama : Oyong

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat wawancara : Jln. Purus I No 9.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Padang, 3 APRIL 2013

Mengetahui

Informan Penelitian

(OYONG)